

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
14 Bulan Desember
BIRO TATA PEMERINTAHAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Pemerasa Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	312.648.500	100,00	100,00	0,00	312.648.500	100,00	267.059.716	85,42	14,58						
1.1	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	100,00	100,00	0,00	312.648.500	100,00	267.059.716	85,42	14,58						
1.1.1	2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	100,00	100,00	0,00	312.648.500	100,00	267.059.716	85,42	14,58	Testimoni asistensi teknis dari batas desa oleh BIG dan testimoni buku kode dan data wilayah oleh BPS	https://drive.google.com/drive/folders/1N9_6S29G6N7Zg7Nhr8Zqg7VA4DEdE?usp=sharing	BIRO TATA PEMERINTAHAN Bagian Pemerintahan Umum			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY : Terlaksananya rapat koordinasi internal: Tersampainya surat permohonan data wilayah administrasi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan surat Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Nomor 125 / 0018. Penyusunan data wilayah tahun 2023 Telah dicetak buku kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY tahun 2023 Buku Kode dan Data Wilayah telah di distribusikan kepada OPD terkait Laporan pembahasan serta pengisian penyetapan dan pengisian batas kalurahan : <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka penyetapan pengisian batas kalurahan/keurahan di DIY. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan BIG dalam rangka penyetapan/pelaksanaan penyetapan dan penetapan batas kalurahan/keurahan. Terlaksananya Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan di DIY selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 - 28 Februari 2023 dengan Narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dihadiri peserta dari OPD Tim Fokus Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota se DIY dan perwakilan lurah se DIY. Tersusuna Surat Gubernur DIY kepada Menteri Dalam Negeri terkait Laporan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan tahun anggaran 2023 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penegasan Batas Kalurahan di Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo Tersusuna surat Surat Perintah/ laporan Pelaksanaan kegiatan di Kab/Kota Semester 1 tahun 2023 Tersampainya Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan penetapan dan pengisian batas kalurahan/keurahan di DIY semester 1 dengan surat Nomor 146/964 tanggal 31 Agustus 2023 Terlaksananya Asistensi teknis dan verifikasi hasil pelaksanaan pengisian batas desa di DIY dengan verifikasi oleh pejabat dari Badan Informasi Geospasial Terlaksananya Konsultasi dan Verifikasi Data Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan di DIY ke BIG bersama Kab/Kota Laporan Pembahasan Revisi Permemdagri Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah : <ol style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan sinkronisasi batas daerah Kab. Gunungkidul - Kab. Wonorejo pada saat/tema Kal. Sanganyu - Desa Perangapuh. Telah dilaksanakan rapat kerja pelaksanaan usulan revisi permemdagri batas DIY-Jateng pada segmen batas Kabupaten Sleman -Kab. Klaten dan Kab. Wonorejo - Kab. Sukoharjo. Telah dilaksanakan rapat kerja pelaksanaan usulan revisi permemdagri batas Kab. Kulon Progo - Kab. Sleman. Telah dilaksanakan tinjauan lapangan dalam rangka konfirmasi garis batas dan konfirmasi status jalan pada perbatasan di Kab. Gunungkidul - Kab. Sukoharjo sebagai titik lanjut raker batas bulan Mei 2023 Telah dilaksanakan surat permohonan bantuan pembahasan usulan revisi permemdagri nomor 19 tahun 2006 tentang batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 126/941 pada tanggal 18 Agustus 2023 kepada Kemendagri Telah dilaksanakan pertemuan dengan usulan revisi Permemdagri batas daerah Kab. Gunung Kidul -Kab. Klaten dan Kab. Kulon Progo. Perwarga & Kantor Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri pada tanggal 30 Desember 2023 Telah dilakukan koordinasi dan Tinjauan Lapangan pada Area Batas Daerah Kab. Kulon Progo DIY dengan Kab. Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Subsektren Kalurahan Jangkaran - Desa Jogobopo Telah dilakukan koordinasi Dalam Rangka Memoklasifikasi Bentuk Aza Kesepakatan Terkait Segmen Batas Daerah di Perbatasan Kabupaten Kulon Progo DIY dengan Kabupaten Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Laporan Sinkronisasi Garis Batas Daerah DIY - Jawa Tengah segmen Kab Kulon Progo - Kab Magelang <ol style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan rapat koordinasi melalui zoom meeting batas daerah kab. gunungkidul - Kab. Wonorejo pada sub segmen Kal Sanganyu - Desa Perangapuh Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan batas DIY - Jateng Segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang di Kalurahan Geboran, Ngargasan dan Pegertarjo Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan batas DIY - Jateng Segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang di Kalurahan Jangkaran dan Banjarjaya Telah dilaksanakan rapat pembahasan dan expose hasil tinjauan lapangan batas DIY - Jateng Segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang sebagai persiapan pelaksanaan Rapat Kerja dengan Kab Magelang dan Prov Jawa Tengah Dilakukan rapat koordinasi dan inventarisasi permasalahan garis batas daerah dengan Pemab Jawa Tengah terkait rencana Rapat Kerja Pembahasan Sinkronisasi Batas Daerah DIY - Jateng segmen Kab Kulon Progo - Kab Magelang Dilaksanakan Raker Sinkronisasi Garis Batas Daerah DIY-Jateng pada segmen Kab Kulon Progo dengan Kab Magelang Penyusunan peta batas daerah pada kawasan strategis Surulyo <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya rapat koordinasi internal Terkumpulnya data dalam rangka pelaksanaan kegiatan Terlaksananya petakan garis batas dan konfirmasi data awal lauh di kawasan strategis Surulyo Tersusunnya peta batas daerah pada kawasan strategis Surulyo Kegiatan telah selesai dan pembahasan/jasa lingkungan Penyusunan peta batas daerah pada kawasan strategis Surulyo dengan SPK Nomor 027/07/2013 tanggal 31 Juni 2023 <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya s.d bulan Desember sebesar Rp 45.588.794 yaitu pada bulan ATK sebesar Rp 275.299, kerta cover Rp 12.075, bahan cetak Rp 511.200, bahan komputer Rp 276.400, honorarium Rp 1.200.000, tm Rp 5.200.000, jasa konsultasi Rp. 548.000, dan Rp 1.200.000, paket meeting Rp.14.112.249 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD Tim Penegasan Batas Daerah/Kelurahan di DIY. Koordinasi dan sinergi dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayah, Pemprov Jawa Tengah, Pemkab di wilayah perbatasan berjalan baik dan lancar.
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.334.000	100,00	100,00	0,00	220.334.000	100,00	217.606.600	98,76	1,24						
2.1	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	24.464.000	100,00	100,00	0,00	24.464.000	100,00	24.431.600	99,87	0,13						
2.1.1	2.12.02.1.01.02	Pelayanan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.464.000	100,00	100,00	0,00	24.464.000	100,00	24.431.600	99,87	0,13	Testimoni dari LKSA yang telah terfasilitasi dokumen administrasi Kependudukan bagi penduduk rentan administratif	https://drive.google.com/drive/folders/1P4WqyNrhvZgme323ap2v1Y9-8rsmvE?usp=sharing	DIY		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi : 74 Dokumen dari 50 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (KK, KIA, KTP, EI, Akta Kelahiran) : 73 dokumen dari 49 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen : 1 dokumen dari 1 dokumen <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya jadwal kegiatan pendaftaran penduduk non permanen dan rentan administratif tahun 2023; Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan raker pendaftaran penduduk non permanen dan rentan administratif pada tanggal 24 Februari 2023; Terlaksananya rapat kerja pendaftaran penduduk rentan administratif pada tanggal 15 Maret 2023; Koordinasi evaluasi pelaksanaan raker kerja pendaftaran rentan dan penduduk non permanen pada bulan April 2023; Terlaksananya koordinasi persiapan raker kerja penduduk rentan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni; Terlaksananya raker kerja penduduk rentan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023 dengan partisipatif keterapa LKSA di wilayah DIY dan Dinas Dukcapil Kab/Kota se-DIY; Terlaksananya raker kerja penduduk non permanen yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2023 membahas mengenai progress pendaftaran dan pendaftaran penduduk non permanen di Kabupaten/Kota se-DIY; Terlaksananya fasilitasi dan penyediaan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan pada bulan Agustus 2023; Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dokumen administratif kependudukan bagi penduduk rentan pada bulan September - Desember 2023; Terlaksananya evaluasi kegiatan Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administratif Tahun 2023 serta penyusunan laporan kegiatan pada bulan Desember 2023; <p>Tematik Kemiskinan Ekstrem & RB Tematik Pengentasan Kemiskinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan rapat kerja pendaftaran penduduk rentan administratif sebanyak 4 kali pada tanggal 15 Maret 2023 dan 14 Juni 2023 dengan mengundang beberapa ahli/LKSA di wilayah DIY serta Dinas Dukcapil Kab/Kota se-DIY untuk sebelumnya perlu/LKSA melakukan pendataan anak stunting yang belum memiliki dokumen kependudukan (KK, Akta Kelahiran, KIA dan KTP-EI). Setelah terkumpul data dari para/LKSA, dokumen pendukung diserahkan ke Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk dapat segera diterbitkan dokumen kependudukan; Sampai dengan bulan Desember 2023 telah terfasilitasi sebanyak 73 dokumen administratif kependudukan kepada anak para/LKSA. <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pernahnya masyarakat terkait kependudukan dokumen administratif kependudukan dan pendaftaran penduduk non permanen. Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang berkaitan dengan administratif, prakarya cukup jauh sehingga masyarakat merasa untuk mendapatkan pelayanan kependudukan. Telah dilakukan jemput bola pelayanan administratif namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan persyarat kependudukan. 	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)							Realisasi (%)	Deviasi		
2.2	2.12.02.1.02	Penyenggaraan Pendaftaran Kependudukan	195.870.000	100,00	100,00	0,00	195.870.000	100,00	193.175.000	98,62	1,38				- terdapat sisa belanja ATK bulan Oktober sebanyak Rp 25.300,- - terdapat sisa belanja kertas/cover bulan Oktober sebanyak Rp 7.200,- Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Diy - terdapat layanan jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sehingga dapat mempermudah layanan adminiduk kepada parti dan UKSA				
2.2.1	2.12.02.1.02.01	Facilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	19.220.000	100,00	100,00	0,00	19.220.000	100,00	18.645.100	97,01	2,99	Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta Yogyakarta menyambut baik kegiatan terkait pendaftaran Warga Negara asing di wilayah Indonesia khususnya wilayah DIY. Pada tahun 2022 ini Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menyiapkan fasilitas terkait pindah datang WNA yang dititikn di kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta sebagai salah satu upaya pendataan WNA yang lebih akurat. Rapor Kerja WNA yang dilakukan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga sebagai upaya pencatatan WNA yang lebih akurat menyerai ke perusahaan/sponsor.	https://drive.google.com/drive/folders/1d4k725UL29H9GUY-pW6D996j6fz?usp=sharing	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk : 1 Laporan dan 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rapor Kerja Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk : 1 Laporan dan 1 Laporan			Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitas terkait pendaftaran penduduk tahun 2022. 2. Terlaksananya rapat koordinasi terkait fasilitas pendaftaran penduduk pada bulan Januari 2022. 3. Terlaksananya rapat kerja pendaftaran warga negara asing di wilayah NGSJ secara daring dengan peserta dari perusahaan/sponsor yang memiliki pegawai WNA dan narasumber dari Dinas Dukcapil Kemendagri dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2022. 4. Terlaksananya kegiatan coffee morning terkait pendataan WNA & DTI secara daring dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota se-Diy dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta pada 14 Maret 2022. 5. Terlaksananya kegiatan terkait Kartu Identitas Anak dan Pendaftaran Pindah Dibayar Orang Asing di Wilayah NGSJ pada bulan April 2022. 6. Terlaksananya Rapor Kerja Pendaftaran Penduduk pada tanggal 21 Mei 2022 dengan peserta dari mahasiswa UGM, UIN, UIN, UIN dan UII. 7. Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait kerja pendaftaran penduduk pada bulan Juni 2022. 8. Terlaksananya rapat koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota pada 20 Juli 2022 membahas terkait pendaftaran penduduk. 9. Terlaksananya evaluasi internal kegiatan Fasilitas terkait Pendaftaran Penduduk pada bulan September 2022. 10. Tersusunnya laporan kegiatan Fasilitas terkait Pendaftaran Penduduk pada bulan Desember 2022. Faktor Penghambat: - efisiensi yang kurang seperti raker warga negara asing pada bulan Februari 2022 sebanyak Rp 480.000 - efisiensi belanja alat tulis kantor bulan April 2022 sebanyak Rp 25.200 - efisiensi belanja kertas cover bulan April 2022 sebanyak Rp 5.200 - efisiensi uang transport peserta raker fasilitas pendaftaran penduduk pada bulan Mei 2022 sebanyak Rp 60.000 - efisiensi belanja flashdisk bulan Juli 2022 sebesar Rp 4.400 Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Diy
2.2.2	2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	176.650.000	100,00	100,00	0,00	176.650.000	100,00	174.529.900	98,80	1,20				Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya jadwal kegiatan sosialisasi terkait administrasi kependudukan tahun 2022; 2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan sosialisasi pada bulan Februari 2022 dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota, Kapanewon/Kemantren, Kabupaten/Kota yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi; 3. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemendagri 73 Tahun 2022 pada tanggal 14 Februari 2022 dengan peserta dari TP PKK di beberapa Kapanewon dan Perwakilan BI & DTI; 4. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 16 Februari 2022 di Kabupaten Gamping; 5. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 17 Februari 2022 di Kabupaten Suryatama; 6. Terpublikasikannya kegiatan Sosialisasi Pemendagri 73 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2022 melalui surat kabar Tribun Jogja; 7. Terpublikasikannya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA yang dilakukan di Kabupaten Gamping dan Suryatama pada tanggal 20 Februari 2022 melalui surat kabar Tribun Jogja; 8. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 2 Maret 2022 di Kapanewon Sertolo; 9. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 3 Maret 2022 di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Depok, Sleman; 10. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 9 Maret 2022 di Kabupaten Berangsan, Kapanewon Wates, Kulon Progo; 11. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 16 Maret 2022 di Kabupaten Pinak, Kapanewon Sleman, Sleman; 12. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 17 Maret 2022 di Kapanewon Gamping, Sleman; 13. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi administrasi pada bulan April 2022 dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota, Kapanewon Kemantren, Kabupaten/Kota yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi; 14. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 11 Mei 2022 di Kabupaten Pengasih, Kulon Progo; 15. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 19 Mei 2022 di Kabupaten Srandak, Sleman; 16. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 25 Mei 2022 di Kapanewon Sewon, Sleman; 17. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 8 Juni 2022 di Kabupaten Pinak, Kapanewon Pinak, Gunungkidul; 18. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 9 Juni 2022 di Kapanewon Wonorejo, Gunungkidul; 19. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 15 Juni 2022 di Kabupaten Legowo, Kapanewon Playen, Gunungkidul; 20. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 22 Juni 2022 di Kapanewon Palyan, Gunungkidul; 21. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital & lingkungan Koton Ngarayakarta pada 14 Juli 2022 dan Kabupaten Paltukan pada 26 Juli 2022; 22. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital lanjutan di lingkungan Koton Ngarayakarta pada 7 dan 8 Agustus 2022; 23. Terlaksananya sosialisasi terkait administrasi kependudukan di media sosial pada bulan September 2022; 24. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terkait capaian dan layanan IKD di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota pada bulan Oktober 2022; 25. Tersusunnya laporan kegiatan Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk pada bulan Desember 2022; Faktor Penghambat: - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebesar Rp 85.200 - efisiensi belanja kertas cover sebesar Rp 14.100 - efisiensi belanja baterai sebesar Rp 20.100 - efisiensi honor narasumber kegiatan sosialisasi DPRD sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Administrasi Kabupaten Berangsan, Wates, Kulon Progo 9 Maret 2022 sebesar Rp 1.000.000,- - efisiensi honor narasumber kegiatan Sosialisasi DPRD DIY sebagai narasumber kegiatan Sosialisasi Administrasi Kabupaten Wonorejo, Gunungkidul 9 Juni 2022 sebesar Rp 1.000.000,- - kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang rencana dilaksanakan pada bulan September dibayar pelaksanaan karena perubahan anggaran dan refocusing tahun 2022 yg masih menunggu teledak lanjut (sebesar Rp 2.000.000,-) - kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tertunda pada bulan September, dilakukan pada bulan Oktober karena refocusing anggaran tidak jedj dilaksanakan Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Diy				
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	72.142.900	100,00	100,00	0,00	72.142.900	100,00	70.692.600	97,99	2,01								
3.1	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	41.622.200	100,00	100,00	0,00	41.622.200	100,00	41.320.900	99,28	0,72								
3.1.1	2.12.03.1.01.04	Facilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	41.622.200	100,00	100,00	0,00	41.622.200	100,00	41.320.900	99,28	0,72								
												Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota : 1 Laporan dan 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Terpadu Fasilitas Dukumen Administrasi Kependudukan : 1 Laporan dan 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. tersusunnya jadwal kegiatan sosialisasi pelayanan kependudukan tahun 2022; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait pendaftaran penduduk pada bulan Januari 2022. 3. Terlaksananya pendataan penunjang pelayanan terpadu (clearing klt, film, ribbon) pada bulan Maret 2022. 4. Terlaksananya penunangan korsep pelayanan terpadu yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2022. 5. Terlaksananya koordinasi internal terkait pelaksanaan pelayanan terpadu. 6. Terlaksananya koordinasi terkait klt Kabupaten yang akan menjadi lokasi pelayanan terpadu dengan memperhatikan jumlah warga KTP-P yang belum dilaksanakan pemukiman korsep. 7. Telah dilakukan pemohonan personel pelayanan terpadu kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. 8. Telah dilakukan pencetakan spanduk pada bulan Juli 2022. 9. Terlaksananya pelayanan terpadu pemukiman KTP-P di Kabupaten Gunungkidul selama dua hari pada 21 Agustus 2022 (dari 4 Agustus (SM N 3 Wonorejo (20)) dan SMA 2 Playen (91)). Hasil pelayanan selama dua hari pemukiman KTP-P sebanyak 67 orang dan pemukiman Identitas Kependudukan Digital sebanyak 102 orang. 10. Terlaksananya koordinasi internal mengenai evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu pada bulan Agustus 2022. 11. Terlaksananya belanja alat tulis kantor penunjang pelaksanaan kegiatan Fasilitas Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota pada bulan Oktober 2022. 12. Tersusunnya laporan kegiatan Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota pada bulan Desember 2022. Faktor Penghambat: - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pernahnya masyarakat terkait konsep pelayanan administrasi kependudukan. - Telah dilakukan jemput bola pelayanan adminiduk namun masih ada masyarakat yang menunda pelayanan pemukiman kependudukan. - efisiensi belanja pengadaan alat penunjang pelayanan terpadu (clearing klt, film, ribbon) sebesar Rp 398.100 - banyak siswa/usia 16 tahun keatas sudah melakukan pemukiman di Kapanewon/Dinas Dukcapil				

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)						
3.2	2.12.03.1.02	Penyenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	30.520.700	100,00	100,00	0,00	30.520.700	100,00	29.371.700	96,24	3,76				<ul style="list-style-type: none"> - efisiensi belanja alat tulis kantor bulan Oktober sebesar Rp 3.000,- Faktor Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> - tercapai komunikasi dan koordinasi yang baik antara Biro Teperim DIY dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan pelayanan jemput bola pemohonan KTP-el di sekolah dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital
3.2.1	2.12.03.1.02.01	Penyenggaraan Pencatatan Sipil	26.104.500	100,00	100,00	0,00	26.104.500	100,00	25.064.400	96,02	3,90	DIY	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Subbagian Bina Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 1 Laporan dan 1 Laporan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelayanan Fasilitas Isbat Nihah : 1 Laporan dan 1 Laporan 	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitas terkait pencatatan sipil tahun 2023; Terbekukannya rapat koordinasi internal penajapan kegiatan fasilitas terkait pencatatan sipil tahun 2023; Terdistribuskannya surat terkait permohonan pendaftaran potensi isbat nihah di Kabupaten/Kota pada bulan Maret 2023; Pembekuan potensi isbat nihah di Kabupaten/Kota di DIY pada bulan April 2023; Monitoring pendaftaran potensi isbat nihah di Kabupaten/Kota di DIY pada bulan Mei 2023; Koordinasi terkait terkait surat permohonan data potensi isbat nihah di Kabupaten/Kota dengan batas maksimal penyerpikan data pada akhir bulan Juni; Terbekukannya potensi isbat nihah di Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan isbat nihah, sehingga kegiatan isbat nihah yang direncanakan di Kabupaten/Kota Progo batal dilaksanakan; Termentransmisinya data potensi pasangan yang akan isbat nihah untuk dikumpulkan di KIA, Stasiun dan diutamakan surat pengantar dari KIA kepada Pengadilan Agama Wonorejo untuk verifikasi dan validasi; Terbekukannya perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten Gunungkidul pada bulan September 2023 dalam rangka koordinasi dan penajapan pelaksanaan isbat nihah serta pembayaran pangar isbat nihah; Terbekukannya kegiatan sidang terpadu isbat nihah kepada 20 pasangan bertempat di Kalurahan Jetis, Kabupaten Saptosari, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 12 Oktober 2023; Tersusunnya laporan kegiatan Fasilitas terkait Pencatatan Sipil tahun 2023 pada bulan Desember 2023; <p>Rf Tematik Pengantaraan Kemiskinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pendaftaran potensi isbat nihah di seluruh Kabupaten/Kota di DIY sejak awal tahun 2023; - Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menyatakan tidak ada potensi isbat nihah di Kabupaten/Kota Progo; - Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa wilayahnya namun dari hasil pendaftaran, potensi isbat nihah di Kabupaten Kulon Progo tidak memenuhi syarat untuk dilakukan isbat nihah, sehingga kegiatan isbat nihah yang direncanakan di Kabupaten Kulon Progo batal dilaksanakan; - Terdapat potensi isbat nihah di Kabupaten Gunungkidul, sehingga akan dilakukan isbat nihah untuk 20 pasangan pada bulan Oktober 2023; - Pada bulan Agustus, telah dilakukan inventarisasi data potensi pasangan yang akan isbat nihah untuk dikumpulkan di KIA, Stasiun dan diutamakan surat pengantar dari KIA kepada Pengadilan Agama Wonorejo untuk verifikasi dan validasi; - Verifikasi dan validasi berita isbat nihah dilaksanakan pada bulan September 2023 oleh Pengadilan Agama Wonorejo; - Terbekukannya kegiatan sidang terpadu isbat nihah kepada 20 pasangan bertempat di Kalurahan Jetis, Kabupaten Saptosari, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 12 Oktober 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesediaan, ketidaktahuan dan belum pernahnya masyarakat terkait keperguruan dokumen administrasi kependudukan; - Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang berkaitan dengan administrasi kependudukan jauh sehingga masyarakat menunda untuk melampirkan potensi kependudukannya; - Telah dilakukan jemput bola pelayanan administrasi namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan pendewasaan kependudukan; - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebesar Rp 48.100 - efisiensi biaya pembayaran pangar isbat nihah ke Pengadilan Agama Wonorejo pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp 1.000.000,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tercapai komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota - tercapai komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat Kabupaten Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, KIA Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul
3.2.1	2.12.03.1.02.01	Penyenggaraan Pencatatan Sipil	26.104.500	100,00	100,00	0,00	26.104.500	100,00	25.064.400	96,02	3,90	DIY	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Subbagian Bina Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 1 Laporan dan 1 Laporan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelayanan Fasilitas Isbat Nihah : 1 Laporan dan 1 Laporan 	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya jadwal kegiatan koordinasi berhalat antar lembaga pemerintah dan non pemerintah kelevengaran provinsi terkait pencatatan sipil tahun 2023; Terbekukannya rapat koordinasi internal penajapan kegiatan kerja sama pemberian insentif bagi pemegang KIA tahun 2023; Terbekukannya kegiatan rapat kerja kerja sama pemanfaatan kartu identitas anak di DIY pada tanggal 21 Maret 2023; Tersusunnya dokumen perancangan perjanjian kerja sama pemberian insentif KIA di DIY antara Pemda DIY dengan Museum Ullen Sentali, Rudalisk Modern Bicycle Outlet Yogyakarta, Toko Buku Diskon Togamas Alfabeta Yogyakarta, Kay's Studio Yogyakarta, Gemendia Sudirman Jogja, Puri Mataram Resto Cafe & Wahana Wisata, Gardens Department Store & Supermarket, PT Produk Rekreasi (Kids Fun) pada bulan April 2023; Terbekukannya perancangan perjanjian kerja sama pemberian insentif KIA di DIY antara Pemda DIY dengan Museum Ullen Sentali, Rudalisk Modern Bicycle Outlet Yogyakarta, Toko Buku Diskon Togamas Alfabeta Yogyakarta, Kay's Studio Yogyakarta, Gemendia Sudirman Jogja, Puri Mataram Resto Cafe & Wahana Wisata, Gardens Department Store & Supermarket, PT Produk Rekreasi (Kids Fun); Terbekukannya penandatanganan perjanjian kerja sama pemberian insentif bagi pemda KIA di DIY pada tanggal 23 Juni 2023 antara Pemda DIY dengan Group Yogyakarta, Purna Caraka Music Studio Yogyakarta, Rhythm & Grooves Music Star Music School Yogyakarta, Hugo Violin School Yogyakarta, Hiji Chicken & Ayam Gorepek Sali Terbekukannya koordinasi dengan stakeholder yang telah melakukan kerja sama pemberian insentif bagi anak pemda KIA di DIY untuk mempromosikan hari anak nasional pada bulan Juli dengan memberikan diskon khusus; Terbekukannya koordinasi dengan Nawangren Sleman yang bermaksud melakukan kerja sama pemberian insentif KIA di DIY pada bulan Agustus 2023; Terbekukannya penandatanganan perjanjian kerja sama pemberian insentif KIA di DIY antara Pemerintah Daerah DIY dengan Nawangren Sleman pada bulan September 2023 secara fisik dan desk; Terbekukannya monitoring dan evaluasi kerja sama pemberian insentif KIA di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY pada bulan Oktober 2023; Tersusunnya laporan kegiatan koordinasi Berhalat Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kelevengaran Provinsi terkait Pencatatan Sipil tahun 2023 pada bulan Desember 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 8.900 karena harga miri yang lebih rendah dari anggaran yang ada; - efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 100.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tercapai komunikasi yang baik antara mitra kerja sama / stakeholder yang memberikan insentif bagi pemegang KIA di DIY
3.2.2	2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berhalat Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kelevengaran Provinsi terkait Pencatatan Sipil	4.416.200	100,00	100,00	0,00	4.416.200	100,00	4.307.300	97,53	2,47	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Subbagian Bina Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berhalat Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Provinsi terkait Pencatatan Sipil : 7 Dokumen dan 3 Dokumen Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemberian Insentif Bagi Anak Pemilik KIA di Wilayah DIY : 7 Dokumen dan 3 Dokumen 	<p>Stakeholder yang melakukan kerja sama pemberian insentif bagi anak di DIY yang memiliki KIA merasa senang jika berupaya meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi (khususnya KIA) dengan adanya publikasi yang merajai kewajiban Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga telah dilaksanakan baik melalui media sosial, media cetak maupun elektronik untuk meningkatkan publikasi stakeholder.</p>
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN	67.573.800	100,00	100,00	0,00	67.573.800	100,00	65.062.091	96,28	3,72				
4.1	2.12.04.1.02	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	67.573.800	100,00	100,00	0,00	67.573.800	100,00	65.062.091	96,28	3,72				
4.1.1	2.12.04.1.02.01	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.331.100	100,00	100,00	0,00	32.331.100	100,00	31.170.091	96,41	3,59	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Data	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan : 1 Laporan dan 1 Laporan Laporan dan 1 Laporan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Pencatatan Data 	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan tahun 2023; Terbekukannya rapat koordinasi internal penajapan kegiatan fasilitas terkait PIAK tahun 2023; Terbekukannya data operasional sistem (DMS) semester II tahun 2022 pada bulan Maret 2023; Tersusunnya laporan kegiatan operasional SIAK pada bulan April 2023 dalam rangka mendukung Dukcapil Kependudukan Digital Terbekukannya pengembangan sistem informasi untuk mendukung solusi PPIE DIY tahun 2023 pada bulan Mei 2023; Tersedianya data kependudukan untuk mendukung PPIE SIAK DIY 2023 dan termentransmisinya data terkait data kependudukan oleh sistem SIAK melalui sistem informasi sinkronisasi data PPIE DIY pada bulan Juni 2023; Terdapat layanan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital di lingkungan Kraton Ngayogyakarta dan Kodipaten Pukelman dan memajukan jenjang pelayanan berhalat dengan baik pada bulan Juli 2023; Terdapat layanan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital layanan di lingkungan Kraton Ngayogyakarta dan memajukan jenjang pelayanan berhalat dengan baik pada 7 dan 8 Agustus 2023; Terbekukannya pelayanan terpadu pemohonan KTP-el dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Gunungkidul serta memajukan jenjang pelayanan berhalat dengan baik pada 21 dan 24 Agustus 2023; Terdapat belanja operasional SIAK untuk service perangkat komputer yang digunakan untuk mengoperasikan SIAK pada bulan September 2023 - 2023; Terdapat belanja perjalanan internet SIAK bulan Oktober 2023; Terbekukannya belanja operasional SIAK pada bulan November 2023; Terdapat koordinasi terkait pelaksanaan PPIE tahun 2024 bersama dengan Dinas Dipora DIY pada bulan Desember 2023; Tersusunnya laporan kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2023 pada bulan Desember 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebanyak Rp 120.100 - efisiensi belanja kertas dan cover Rp 6.000 - efisiensi belanja internet bulan Januari Rp 52.043

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keuaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)						
															<ul style="list-style-type: none"> - efisiensi belanja internet bulan Februari Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Maret Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan April Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Mei Rp 52.043 - pengembangan sistem informasi untuk mendukung seleksi PPKB DIY 2023 terkait administrasi dilaksanakan pada bulan Mei 2023 menggunakan konsep pelaksanaan PPKB di Dinas Dikpora DIY - efisiensi belanja internet bulan Mei Rp 52.043 - efisiensi belanja pengembangan sistem informasi untuk mendukung seleksi PPKB DIY tahun 2023 bulan Mei 2023 sebesar Rp 300.000 - efisiensi belanja internet bulan Juni Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Juli Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Agustus Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan September Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan Oktober Rp 52.043 - efisiensi belanja internet bulan November Rp 52.043 - efisiensi belanja operasional SIAK bulan November sebesar Rp 65.000 - efisiensi belanja internet bulan Desember Rp 48.436 <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota se-DIY - Koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dalam proses seleksi PPKB DIY 2023
4.1.2	2.12.04.1.02.05	Penyenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.242.700	100,00	100,00	0,00	35.242.700	100,00	33.892.000	96,17	3,83	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1m-zu9p7hFTTjshakKqGyBdFp4?usp=sharing</p> <p>- Instansi yang melakukan pemindahan data menas sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan untuk verifikasi dan validasi data kependudukan. - Peserta Rapat Kerja "Memanfaatkan Data Kependudukan" bagi Pemilih pada Pemilu 2024 di Lingkungan Civitas Akademik" mempuatkan Rektor Universitas yang memiliki TPS Kampus, perbaikan BEM perguruan tinggi dan Forum BEM DIY pada tanggal 19 September 2023 menas sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini sebagai salah satu sosialisasi adanya TPS Kampus yang sudah terampil 18 perguruan tinggi</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal penajapan kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tahun 2023; 3. Penyempurnaan data kependudukan dari Dinas Sosial DIY terkait verifikasi data penerima bantuan sosial khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY; 4. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan kegiatan rapat kerja terkait sinkronisasi data pemilu 2024 pada bulan April 2023; 5. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Konsolidasi Data Pendukung Data Pemilih dan Pilkada dengan peserta dari mahasiswa/UGM pada bulan Mei 2023; 6. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja "Dukung Pemilih Daerah untuk Data Pemilih-Pilkada Serentak 2024 yang Berkualitas" pada tanggal 30 Juni 2023; 7. Terlaksananya pemohonan data IPS DIY terkait NIK ASN Pemda DIY untuk mendukung finalisasi data Register pada bulan Juni 2023; 8. Terfinalisasi pemohonan data PPL PLANU Jawa Tengah dan DIY UPTD Yogyakarta terkait data rumah kepala keluarga di DIY tahun 2023 pada bulan Juli 2023; 9. Terlaksana Data Konsolidasi Berah (DKB) Semester 1 Tahun 2023 pada bulan Agustus 2023 sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi/lembaga; 10. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja "Memanfaatkan Dokumen Administrasi Bagi Pemilih pada Pemilu 2024 di Lingkungan Civitas Akademik" mempuatkan perwakilan Rektor Universitas yang memiliki TPS Kampus, perwakilan BEM perguruan tinggi dan Forum BEM DIY pada tanggal 19 September 2023; 11. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja "Administrasi Kependudukan Terkini, Koordinasi Kaut, Optima Pemilih di DIY Aman, Juri dan Damai" mempuatkan Kepala Beker dan perwakilan Kabupaten yang memiliki potensi keawanan saat Pemilu 2024 pada tanggal 22 September 2023; 12. Target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi pelaksanaan output pada bulan Oktober 2023 (terjadi ketidakefisienan realisasi 9% fungsional dan data di sepagul); 13. Telah dilaksanakan surat pemohonan penggantian kerja sama pemanfaatan data kependudukan ke Dinas Dikpora DIY dan Dinas Sosial DIY pada tanggal 19 September 2023; 14. Terlaksananya rapat koordinasi pada bulan Oktober 2023 terkait sinkronisasi data kependudukan dan informasi dari Penerima Kependudukan DIY terkait potensi kerja sama pemanfaatan web portal dan sistem Kependudukan untuk layanan di instansi tersebut; 15. Terlaksananya koordinasi terkait perubahan Permenandi 102/2019 menjadi Permenandi 17/2023 dan implikasi kepada surat penggantian kerja sama Dinas, BKK dan Dikpora yang sementara di hold menunggu prosedur baru menyesuaikan dengan Permenandi 17/2023 tersebut; 16. Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja "Dukung Administrasi Kependudukan bagi Pemutakhiran Data Pemilih dan Peringatan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 di DIY" pada tanggal 14 Desember 2023 mempuatkan Lurah yang memiliki potensi pindah datang cukup tinggi di DIY; 17. Tersusunnya laporan kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan tahun 2023 pada bulan Desember 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - belum ada anggaran kas keuangan pada triwulan 1 karena penganggaran dimulai pada bulan April 2023 namun persiapan dan kegiatan telah dilakukan tanpa dukungan anggaran. - Terlaksananya akses database kependudukan akibat perubahan SIAK terpusat, saat ini database kependudukan dihosting sepenuhnya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri - Efisiensi honor narasumber rapat kerja data pemilih-pilkada 2024 karena ketidakefisienan (PPRD DIY) pada bulan Juni 2023 sebesar Rp 1.000.000 - terdapat sisa belanja alat tulis kantor dan kertas pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 50.700 - efisiensi yang tercapai peserta Rapat Kerja "Administrasi Kependudukan Terkini, Koordinasi Kaut, Optima Pemilih di DIY Aman, Juri dan Damai" pada tanggal 22 September 2023 karena beberapa peserta dari kabupaten sebesar Rp 300.000 - terdapat perubahan Permenandi 102/2019 menjadi Permenandi 17/2023 sehingga penggantian kerja sama yang diusulkan (Dinas, BKK, Dikpora) di hold sementara waktu menunggu prosedur yang baru <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instansi/QPO dapat melakukan pemanfaatan data kependudukan melalui Dinas Dukapur 		
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	41.126.000	100,00	100,00	0,00	41.126.000	100,00	41.126.000	100,00	0,00				
5.1	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	41.126.000	100,00	100,00	0,00	41.126.000	100,00	41.126.000	100,00	0,00				
5.1.1	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kabupaten yang lain	41.126.000	100,00	100,00	0,00	41.126.000	100,00	41.126.000	100,00	0,00	<p>https://drive.google.com/drive/folders/E5atW1CtE2SqU3h8hcyPuAq09yVtGRC7?usp=drive_jnk</p> <p>Profil Kependudukan tersusun dengan baik oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota di DIY dan Provinsi sehingga sudah dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika maupun masyarakat yang memerlukan</p>	<p>Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</p> <p>Desah Istimewa Yogyakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kabupaten Lain : 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Profil Data dan Proyeksi Kependudukan dan Pemanfaatan Data : 1 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya jadwal kegiatan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan pada tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi internal penajapan kegiatan penyusunan profil data kependudukan tahun 2023; 3. Terfinalisasikannya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil kemendagri pada bulan Februari - Maret 2023; 4. Terlaksananya surat pemohonan data pendukung penyusunan profil kependudukan tahun 2023 di bidang kependudukan dan pendataan kepada Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Dikpora DIY; 5. Terlaksananya proses pengumpulan data kependudukan semester II 2022 dan data dukung lainnya dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan; 6. Tersusunnya data pendukung penyusunan profil kependudukan tahun 2023 diantaranya meliputi data konsolidasi bersih dan data dari Dinas Dikpora DIY; 7. Telah dilakukan rapat koordinasi dan penyusunan buku profil kependudukan tahun 2022 oleh tenaga ahli; 8. Tersusunnya buku profil kependudukan tahun 2022 dan dilakukan publikasi melalui website biro data pemerintahan; 9. Terlaksananya evaluasi internal terkait penyusunan buku profil kependudukan tahun 2022; 10. Tersusunnya laporan kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kabupaten yang lain tahun 2023 pada bulan Desember 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan persiapan pada semester I / bu 1 dan bu 2 dapat dilaksanakan tanpa dukungan anggaran - anggaran kegiatan dianggarkan mulai bulan Juli 2023 untuk perbaikan jasa konsultasi penyusunan profil - terdapat sisa belanja jasa konsultasi penyusunan profil kependudukan pada bulan Juli 2023 sebesar Rp 500.000, masuk pada kelebihan rekrusiva yang mana pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp 41.626.000 menjadi Rp 41.126.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2022
6	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	50.000.000	100,00	100,00	0,00	50.000.000	100,00	44.631.700	89,26	10,74				
6.1	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000	100,00	100,00	0,00	50.000.000	100,00	44.631.700	89,26	10,74				
6.1.1	2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	15.306.800	100,00	100,00	0,00	15.306.800	100,00	14.718.800	96,16	3,84	<p>https://bnyr.org/testimoniKetuaNayentaka</p> <p>Testimoni Ketua Nayentaka</p>	<p>BIRD TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam upaya pembinaan dalam membangun pemerintahan desa dalam upaya penyelesaian permasalahan Dukuh pada tanggal 2 Februari - Koordinasi dalam konteks desa / kalurahan di DIY sehingga adanya kebijakan penataan desa dalam aspek kebijakan reformasi birokrasi - Pelaksanaan Rapat Kerja Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa dengan pengutan manajemen pada aspek inovasi pelayanan publik di Kalurahan pada tanggal 18 Juli melibatkan pemateri dari unsur peneliti "Institute for Research and Empowerment" (IRE) - Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Kabupaten Yogyakarta, serta Lurah Pleret sebagai hasil analisis pelaksanaan inovasi layanan di Kalurahan. <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 588.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan Nayentaka selaku Pengayuban Lurah dan Pemula Pemula untuk hadir memberikan arahan - Kesiapan pemula khususnya dari Kemendagri dan Dinas PPK 4 Kabupaten untuk hadir memberikan arahan dan masukan dalam rapat koordinasi - Komitmen waktu dan penyediaan materi yang relevan sesuai tema oleh narasumber dalam pelaksanaan rapat kerja pembinaan manajemen pemerintahan desa
6.1.2	2.13.04.1.01.04	Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	18.088.400	100,00	100,00	0,00	18.088.400	100,00	14.251.400	78,79	21,21	<p>https://bnyr.org/testimoniKetuaNayentaka</p> <p>Testimoni Ketua Nayentaka</p>	<p>BIRD TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa : 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa : 1 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa : 1 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa - Facilitasi pembinaan dengan Kalurahan Selomartani, selaku penerima BKK papak pemula kebidanan dalam pengutan persiapan penyelesaian dokumen pelaksanaan pembangunan jajan pemula kebidanan - Facilitasi Koordinasi dengan Perwakilan Lurah-Kalon Progo, Bantul, Seman dan Gunungkidul terkait upaya optimalisasi potensi desa melalui rancangan rencana pelaksanaan yang dianggarkan dalam dokumen RUPKAL. - Facilitasi Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)						
															<p>dalam Penyusunan Petunjuk Teknis Pedoman Reformasi Birokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Kerja Pembinaan Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan Balai PMD dan RE Yogyakarta dan Kabupaten Pajangjaya tanggal 8 Agustus - Target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi ketercapaian output karena sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat kecil secara intens. - Pelaksanaan Rapat Kerja Fasilitas Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan Desa pada tanggal 7 November melibatkan OPD DIT dan Kabupaten untuk melakukan koordinasi terhadap perencanaan pembangunan desa sehingga dilaksanakan reformasi kearahannya <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pelaksanaan bulan lalu sempat terkendala adanya satu aktivitas kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dikarenakan menunggu penetapan APBD Perubahan 2023 dan kegiatan refocusing karena arahan dari TAPD kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena masih menunggu evaluasi Kementerian, namun target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mempengaruhi ketercapaian output karena sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat kecil secara intens dan telah dilaksanakan Rapat Kerja untuk koordinasi terkait perencanaan pembangunan kearahannya - Adanya efisiensi paket meeting dan adanya sisa honor narasumber sebesar Rp. 3.837.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesediaan Nelayanka selaku Paguyuban Luruh dan Pemang Provisi untuk hadir memberikan arahan - Kesediaan peserta khususnya dari Kementerian dan Dinas BKK di Kabupaten untuk hadir memberikan arahan dan masukan dalam rapat koordinasi - Komitmen tinggi dan penyampaian materi yang relevan sesuai tema oleh narasumber dalam pelaksanaan rapat kerja pembinaan manajemen pemerintahan desa - Penetapan RAPROD perubahan sehingga aktivitas sub kegiatan dapat dilaksanakan
6.1.3	2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.604.800	100,00	100,00	0,00	16.604.800	100,00	16.661.500	94,32	5,68			<p>Testimoni Ketua Paguyuban Luruh DIY Nelayanka terkait aktivitas Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa</p> <p>https://fbnyur.com/testimoni/ketuaNelayanka</p> <p>BBRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kurahan dan Kapanwong/Kemantren</p> <p>1. Jumlah Dokumen Hasil Terlembaganya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Terlembaganya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Fasilitas Keuangan Desa dengan Dinas BKK Kabupaten - Rapat Kerja Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Dinas BKK Kabupaten tanggal 15 November 2022 dan Dinas BKK Kabupaten serta 10 Perumda pada tanggal 26 Mei 2023 - Pengelolaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa terkait perencanaan aplikasi Siskeudes <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 943.300 <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesediaan Nelayanka selaku Paguyuban Luruh dan Pemang Provisi untuk hadir memberikan arahan - Kesediaan peserta khususnya dari Kementerian dan Dinas BKK di Kabupaten untuk hadir memberikan arahan dan masukan dalam rapat koordinasi - Komitmen tinggi dan penyampaian materi yang relevan sesuai tema oleh narasumber dalam pelaksanaan rapat kerja pembinaan manajemen pemerintahan desa - Penetapan RAPROD perubahan sehingga aktivitas sub kegiatan dapat dilaksanakan 	
7	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA UNISARI KEBUDAYAAN	385.850.700	100,00	100,00	0,00	385.850.700	100,00	375.388.872	97,29	2,71				
7.1	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permusyawaratan	133.725.000	100,00	100,00	0,00	133.725.000	100,00	126.761.772	94,79	5,21				
7.1.1	2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan	133.725.000	100,00	100,00	0,00	133.725.000	100,00	126.761.772	94,79	5,21		DIY		<p>Masyarakat : * menyambut baik dengan adanya Perayaan Hari Jadi DIY yang dipromosikan setiap tanggal 13 Maret, mulai tahun depan 2024 akan ada perayaan Hari Jadi DIY</p> <p>https://bit.ly/testimoni_pemerintahnatum</p> <p>BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum</p> <p>1. Jumlah Dokumen Hasil Terlembaganya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : 2 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Terlembaganya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Draft Raport tentang Penetapan Hari Jadi DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan Tim Hari Jadi DIY 2. Menyampaikan surat permohonan personal tim kepada OPD terkait 3. Telah terlaksana Rapat Penyusunan NA Hari Jadi DIY 2023 4. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi DIY pada Selasa, 9 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB - selesai di Ruang Rapat Sastrang Pajaj, Gedung Kerasa Lantai 1, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pada rapat tersebut Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dihadap oleh Tenaga Ahli, perwakilan Institute for Research and Empowerment (IRE), Sekretaris DPRD DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 5. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi DIY pada Selasa, 29 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB - selesai yang dilakukan secara daring. Rapat dihadiri oleh Tim Tenaga Ahli dari BKK, Biro Hukum Setda DIY, Biro Organisasi Setda DIY, dan Kanwil Kementerian DIY dan Biro Tapem, dengan agenda Pembahasan dan penyetoran draft Naskah Akademik dan Draft Raperda Hari Jadi. 6. Menyampaikan Nota Dinas No. 120/0276 kepada Biro Hukum untuk menyampaikan konsep Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan Keputusan Gubernur DIY nomor 96/Tim/2023, karena urgensi penyusunan Tim ini dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur. 8. Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi penyusunan Naskah Akademik dan Draft Raperda Hari Jadi DIY pada tanggal 22 September 2023 pukul 13.00 WIB - selesai di Ruang Rapat Sastrang Pajaj, Lantai 1, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 9. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Draft Naskah Akademik dan Raperda Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 dan Yayasan Jati FLAMMA. 10. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Hari Jadi DIY pada tanggal 27 November 2023 di Ruang Sastrang Pajaj Lantai 1, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 11. Penetapan Raperda Hari Jadi DIY pada tanggal 11 Desember 2023 di Hotel Millennium Jakarta dengan 2 narasumber dan Depati Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perputakaan Nasional Republik Indonesia dan Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Ombudsman 12. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Hari Jadi DIY pada hari Jumat, 22 Desember 2023 pukul 09.00 WIB - selesai di Ruang Rapat Sastrang Pajaj, Gedung Kerasa Lantai 1, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya perubahan jadwal kegiatan yang telah direncanakan dari awal karena menyesuaikan pihak eksternal (jurnal) penyusunan Perubahan Proppempera di DPRD DIY), sehingga Rapat kerja yang sedianya akan dilaksanakan bulan Agustus tidak dapat terlaksana sehingga terdapat efisiensi beberapa komponen biaya diantaranya: - materi harian umum sebesar Rp1.275.000 - narasumber sebesar Rp2.000.000 (tidak memengaruhi capaian output, ditinjau melalui daring) <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dan Koordinasi antar OPD terkait dan Tenaga Ahli - Tersedianya anggaran dan peralatan kantor yang memadai
7.2	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Unsur Kebudayaan	252.125.700	100,00	100,00	0,00	252.125.700	100,00	248.627.100	98,61	1,39				
7.2.1	2.22.08.5.06.03	Pengadaan Sarana Fasilitas dan Peranda Keistimewaan	252.125.700	100,00	100,00	0,00	252.125.700	100,00	248.627.100	98,61	1,39				<p>Testimoni Luruh Selomartani</p> <p>https://youtu.be/7craifweds</p> <p>BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kurahan dan Kapanwong/Kemantren</p> <p>1. Jumlah Sarana Publikasi dan Peranda Keistimewaan : 304 Unit dari 303 Unit</p> <p>2. Jumlah Papan Nama Keistimewaan : 1 Kelurahan dari 1 Kelurahan</p> <p>3. Kajian Standar Peranda Wilayah Keistimewaan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Penetapan Ombudsman Response System (ORS) Code : 302 Kelurahan dari 302 Kelurahan</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Selomartani dengan hasil: <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan proposal kegiatan pembangunan Papan Peranda Keistimewaan oleh Kelurahan Selomartani; b. Proses Penetapan anggaran oleh BPPA DIY; c. Proses pengalihan barang dan pembangunan; d. Pelaksanaan hasil pembangunan Papan Peranda Keistimewaan. 2. Rapat Koordinasi terkait Peranda Keistimewaan pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Paguyuban Semar Sembogo sebanyak 25 orang dengan pembahasan terkaitnya: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; b. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; c. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; d. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; e. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; f. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; g. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; h. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; i. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; j. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; k. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; l. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; m. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; n. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; o. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; p. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; q. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; r. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; s. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; t. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; u. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; v. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; w. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; x. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; y. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; z. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 3. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 4. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 5. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 6. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 7. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 8. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 9. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 10. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 11. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 12. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 13. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 14. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 15. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 16. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 17. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 18. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 19. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 20. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 21. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 22. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 23. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 24. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 25. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 26. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 27. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 28. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 29. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 30. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 31. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 32. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 33. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 34. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 35. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 36. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 37. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 38. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 39. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 40. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 41. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 42. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 43. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 44. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 45. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 46. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 47. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 48. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 49. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 50. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 51. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 52. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 53. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 54. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 55. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 56. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 57. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 58. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 59. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 60. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 61. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 62. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 63. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 64. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 65. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 66. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 67. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 68. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 69. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 70. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 71. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 72. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 73. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 74. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 75. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 76. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 77. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 78. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 79. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 80. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 81. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 82. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 83. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 84. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 85. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 86. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 87. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 88. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 89. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 90. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 91. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 92. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 93. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 94. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 95. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 96. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 97. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 98. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 99. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY; 100. Pembahasan anggaran hasil BPPA DIY;

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)						
														<p>Kastimewan</p> <p>2) Kajian Peranda Wilayah Kastimewan</p> <p>- Napa Koordinasi terkait pelaksanaan kajian pada tanggal 14 dan 24 Agustus 2022 melibatkan tim Tenaga Ahli dengan hasil sebagai langkah awal akan dilakukan observasi untuk mendapatkan informasi tambahan pada batas wilayah dan adanya ketidakan analisis data, dan terakhir hasil kesimpulan akan dibagikan dalam forum yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September</p> <p>- Terevisikannya Kajian Peranda Wilayah Kastimewan di DIY</p> <p>3) Pemasangan Quick Response System (QRS Code) Pada Papan Peranda Kastimewan di 302 Kalurahan - Koordinasi Pemasangan Pemasangan Kebijakan Teknis Pembuatan dan Pemasangan QRS Code - Penyediaan Etni Dokumen Perijinan pada web LPSE - Pemasangan Quick Response System (QRS) Code pada papan peranda kastimewan di Kalurahan dengan progres s/d November Minggu pertama jumlah kalurahan Simeran 66 Kalurahan Gunungkidul 115 Kalurahan.</p> <p>- Pemasangan Quick Response System (QRS) Code di Papan Peranda Kastimewan di Kalurahan sejumlah 302 unit Kalurahan telah disediakan. Dengan Rincor: Kabupaten Gunungkidul : 116 Kalurahan Kabupaten Simeran: 66 Kalurahan Kabupaten Kulon Progo: 65 Kalurahan Kabupaten Bantul: 55 Kalurahan</p> <p>Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan berarti</p> <p>Faktor Pendukung: - Kesediaan Pemerintah Kalurahan Selomartani untuk memasang QRK Pembangunan Papan Peranda Kastimewan - Ketersediaan waktu Pemerintah Kalurahan Selomartani untuk melakukan pembangunan papan peranda kastimewan dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban - Komitmen tenaga ahli pada Kajian Peranda Wilayah dalam koordinasi - Kesiapan penyusunan dokumen pengandaan pemasangan QRS Code pada Papan Peranda Kastimewan di 302 Kalurahan - Terevisikannya pemasangan Quick Response System (QRS) Code pada papan peranda kastimewan di 66 kalurahan Simeran - Terevisikannya pemasangan Quick Response System (QRS) Code pada papan peranda kastimewan di 302 Kalurahan - Terevisikannya Kajian Peranda Wilayah Kastimewan di DIY</p>	
8	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	608.366.100	100,00	100,00	0,00	608.366.100	100,00	597.667.602	98,24	1,76				
8.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.719.900	100,00	100,00	0,00	21.719.900	100,00	21.378.900	98,43	1,57				
8.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.247.200	100,00	100,00	0,00	11.247.200	100,00	11.025.800	98,03	1,97	<p>Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</p> <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<p>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: 8 Dokumen dari 5 Dokumen</p> <p>2. Rencana Strategi Biro Tapem Tahun 2022-2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Rencana Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024 : 2 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>4. Rencana Kinerja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 - Subbagian Tata Usaha</p> <p>5. Tersusunnya ROKH : 2 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Tersusunnya Perjanjian Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 : 2 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>7. Revisi Dokumen Restra 2022-2027</p> <p>8. Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024</p> <p>9. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV</p> <p>10. Pembuatan Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan untuk Tahun 2024 (RKA)</p> <p>11. Penormatan RKA 2024 oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah DIY</p> <p>12. Revisi Dokumen Restra 2022-2027</p> <p>13. Penyusunan rekrutir restri 2024</p> <p>14. Entry papu pasca reforesung 2024 di SIPD</p> <p>15. Cek Kancangan Akhris Keptra Tahun 2022-2027</p> <p>16. Entry rncan bekrang 2024 di Aplikasi SIPD baru</p> <p>17. Identifikasi pagu RPMD Perubahan 2023</p> <p>21. RAPRO Perubahan 2023</p> <p>22. RKA Perubahan 2024</p> <p>23. Entry pengesahan pagu dan perubahan TUK di SIPD</p> <p>24. Cek realisasi Restra 2023</p> <p>25. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV</p> <p>26. Tersusunnya RKA 2024 dan revisi RKA Das 2024</p> <p>27. Entry anggar 2024 di SIPD</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Efisiensi honor narasumber Forum Perangkat Daerah dibarengi PHD tidak bisa dihari kemudian, hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Entry rncan bekrang pada Aplikasi SIPD yang baru perlu dipelajari secara mandiri. 3. Aplikasi SIPD yang masih dalam pengembangan menyebabkan entry memakan waktu. 4. SHD dalam SIPD baru belum bisa terkomodor sama, sehingga menghambat proses entry.</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Koordinasi internal yang solid 2. Tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Keaktifan pegawai berkoordinasi dengan TAPD</p>		
8.1.2	4.01.01.1.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.472.700	100,00	100,00	0,00	10.472.700	100,00	10.353.100	98,86	1,14	<p>Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</p> <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<p>1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: 14 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Dokumen LK 3P : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Laporan monvri baliun/baliun (LKP) : 13 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Penandatanganan di MoMarek mengakibatkan penyesuaian tertunda. 2. Terdapat silsilah ukir kinerja yang mengalami perubahan yang akibatnya menghambat aktivitas sehingga mengurangi penyusunan anggaran</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens 3. Efor kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselenggaranya laporan tepat waktu.</p>		
8.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.724.600	100,00	100,00	0,00	43.724.600	100,00	43.592.200	99,70	0,30				
8.2.1	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengipin/Verifikasi Keuangan SKPD	31.560.000	100,00	100,00	0,00	31.560.000	100,00	31.560.000	100,00	0,00	<p>Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</p> <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<p>1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengipin/Verifikasi Keuangan dan SKPD : 3 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis</p> <p>3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis</p> <p>4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis</p> <p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengumpulan bahan 2. Pembentukan panitia teknis pertanggungjawaban keuangan seluruh program sampai dengan Bulan Desember 3. Penyusunan laporan keuangan dan sudah terverifikasi sampai dengan bulan Desember 4. Pembayaran honorarium tim penatausahaan keuangan triwulan 3 tahun 2023 5. Pembayaran honorarium tim penatausahaan keuangan triwulan 4 tahun 2023</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Pengumpulan dokumen mendekati akhir bulan tutup buku 2. Menu-menu dalam aplikasi SIPD penatausahaan keuangan belum semuanya karena data-data belum belum terinput, sehingga Bendahara harus membuat laporan keuangan</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens.</p>		
8.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.247.200	100,00	100,00	0,00	11.247.200	100,00	11.025.800	98,03	1,97	<p>https://drive.google.com/file/d/1BMD10MUpSheRqjWwVgX0v1bV_xv/view?usp=sharing</p>	<p>Unit: mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum memertimakan tingkat kualitas yang Sangat baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023 hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p>		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)						
8.4.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	32.203.400	100,00	100,00	0,00	32.203.400	100,00	31.656.300	98,30	1,70		<p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<p>1. Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket 2. Alat Tulis Kantor : 1 Paket dari 1 Paket 3. Tabung Pemadam Kebakaran : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD 2. Mengalokasikan peralatan dan perlengkapan kantor Bulan Desember untuk mendukung kelancaran kegiatan 3. Memeriksa toner untuk cartridge printer demi kelancaran kegiatan biro 4. Penyetoran ATK s.d. bulan Desember Beberapa barang belum tersedia di Mbzmarket sehingga pembelian dilakukan secara manual (offline) Faktor Penghambat: 1. Kecepatan rekaman dalam merespon kebutuhan biro 2. Dedikasi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu</p>
8.4.3	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.984.900	100,00	100,00	0,00	6.984.900	100,00	6.984.900	100,00	0,00		<p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<p>1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 2. Peralatan kebersihan dan bahan pemertahan : 3 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggantian SKPD s.d. Bulan Desember 2. Mengalokasikan barang cetakan dan penggantian s.d. Bulan Desember Faktor Penghambat: Beberapa barang belum tersedia di Mbzmarket.co.id sehingga pembelian dilakukan secara manual (offline) Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekaman untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggung jawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu</p>
8.4.4	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.489.000	100,00	100,00	0,00	21.489.000	100,00	21.489.000	100,00	0,00		<p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<p>1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket 2. Barang cetakan : 1 Paket dari 1 Paket 3. Penggandaan : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggantian SKPD s.d. Bulan Desember 2. Mengalokasikan barang cetakan dan penggantian s.d. Bulan Desember Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekaman untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggung jawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Koordinasi dan kerjasama antar pegawai yang terjamin baik untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan</p>
8.4.5	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perantara Pengabdian-Indangan	11.160.000	100,00	100,00	0,00	11.160.000	100,00	11.160.000	100,00	0,00		<p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<p>1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perantara Pengabdian-Indangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Bahan bacaan Jwa Prat : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Bahan bacaan Kebutuhan Rakyat : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan pada SKPD s.d. Bulan Desember 2. Menyediakan bahan bacaan surat kabar harian untuk memberikan informasi yang cukup dalam rangka mendukung kinerja SKPD s.d. Bulan Desember Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerja sama antarpewagai yang solid 2. Kecepatan penyedia dalam merespon kebutuhan biro</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
8.4.6	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.803.000	100,00	100,00	0,00	223.803.000	100,00	223.413.000	99,83	0,17	https://drive.google.com/file/d/1nLBAHAW7IbAFJ3rQcC9990RrPF3jyVwv7/view?usp=sharing	Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan konsultasi dan koordinasi : 1 Laporan dari 1 Laporan		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah sampai dengan Bulan Desember. 2. Target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mengganggu ketercapaian output karena belum ada koordinasi dilaksanakan mengenai rapat-rapat kecil secara intens. <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi perjalanan dinas, harga di bawah DPA. 2. Masih menunggu penentuan APBD Perubahan 2023 dan kebijakan reforesing karena arahan dari TAPD menunggu evaluasi lagi. Namun target output sudah tercapai, deviasi keuangan tidak mengganggu ketercapaian output karena sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat kecil secara intens.
8.4.7	4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	100,00	100,00	0,00	50.000.000	100,00	49.627.000	99,25	0,75	https://drive.google.com/file/d/1M0MDU0UayShehQjWVwVngC150Y.../view?usp=sharing	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Penetapan Website Tahun 2023 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY : 1 Website dari 1 Website	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kebutuhan pemeliharaan website: Biro 2. Koordinasi dengan pihak ketiga melalui asan terkait pemeliharaan dan pengembangan website: Biro Tapem 3. Tercapainya pemeliharaan website: Biro Tapem <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya efisiensi LS 2. Tidak ada hambatan yang berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Penguasaan teknologi (zoom) untuk melakukan koordinasi yang cukup intens. 3. Eros kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu. 	
8.5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Pemungutan dan Pemertintahan Daerah	7.985.000	100,00	100,00	0,00	7.985.000	100,00	4.708.635	58,97	41,03					
8.5.1	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.985.000	100,00	100,00	0,00	7.985.000	100,00	4.708.635	58,97	41,03	https://drive.google.com/file/d/1nLBAHAW7IbAFJ3rQcC9990RrPF3jyVwv7/view?usp=sharing	Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan penyediaan jasa surat menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetik/mengetik kebutuhan materi pada SKPD s.d. Bulan Desember 2. Mengetik/mengetik kebutuhan materi untuk memenuhi kebutuhan SKPD s.d. Bulan Desember <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya efisiensi paket pengiriman karena program anggaran e-KTP sudah cukup dan terlaksana dengan baik 2. Tidak ada hambatan yang berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai untuk memanfaatkan media sesuai dengan peruntukannya 	
8.6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan dan Pemertintahan Daerah	160.364.700	100,00	100,00	0,00	160.364.700	100,00	159.701.000	99,59	0,41					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Realisasi (%)	Devisi	Testimoni Pemenerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Devisi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)								
8.6.1	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.344.300	100,00	100,00	0,00	177.344.300	100,00	175.453.300	98,88	1,12	<p>Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekeloa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,4. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atau hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1nL3BAHAW70zAF3RQcQD9990RrPfcjU/view?usp=sharing</p>	<p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapayonan/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<p>1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibersihkan: 1 Unit dari 1 Unit 2. Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 : 1 Unit dari 1 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan s.d. Bulan Desember 2. Pemeliharaan servis kendaraan dinas jabatan s.d. Bulan Desember 3. Mengidentifikasi kebutuhan untuk cadang kendaraan s.d. Bulan Desember Faktor Penghambat: 1. Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerjasama antarpegawai yang solid 2. Ketiapaan pegawai untuk merawat kendaraan</p>		
8.6.2	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.538.100	100,00	100,00	0,00	105.538.100	100,00	105.127.100	99,61	0,39	<p>Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekeloa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,4. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atau hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1nL3BAHAW70zAF3RQcQD9990RrPfcjU/view?usp=sharing</p>	<p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapayonan/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<p>1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibersihkan Pajak dan Perawatannya : 11 Unit dari 11 Unit 2. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 : 4 Unit dari 4 Unit 3. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 : 7 Unit dari 7 Unit</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional 2. Pemeliharaan servis kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran aktivitas SKPD s.d. Bulan Desember 3. Mengidentifikasi bahan bakar minyak dalam bentuk voucher s.d. Bulan Desember Faktor Penghambat: 1. Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kendaraan operasional untuk memfasilitasi kendaraan dinas operasional sesuai peruntukannya</p>		
8.6.3	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	37.082.300	100,00	100,00	0,00	37.082.300	100,00	37.028.600	99,86	0,14	<p>Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekeloa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,4. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atau hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p> <p>https://bit.ly/testimoni_pemerintahannum</p>	<p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapayonan/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<p>1. Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 5 Unit dari 3 Unit 2. Air Conditioner : 1 Jenis dari 1 Jenis 3. Komputer : 3 Jenis dari 1 Jenis 4. LCD Proyektor : 1 Jenis dari 1 Jenis</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan perlatan dan mesin pada SKPD s.d. Bulan Desember 2. Pemeliharaan Perlatan Komputer (garni hardisk, penambahan memori, update aplikasi, dan lain sebagainya) s.d. Bulan Desember 3. Pemeliharaan laptop s.d. Bulan Desember 4. Pemeliharaan Air Conditioner (air filter, penindakan posisi AC, dan penurunan suhu) s.d. Bulan Desember Faktor Penghambat: 1. Bahan ini tidak dituangkan pengadangan perlatan, pemeliharaan AC perlu penanganan yang baru 2. Gangguan listrik mengakibatkan AC kotor dan berbau 3. Aliran listrik di unit 2 sering trouble dan tiba-tiba mati. Faktor Pendukung: 1. Keaktifan pegawai dalam melaporkan kerusakan sehingga dapat ditangani dengan cepat pada 2. Penanganan keluhan yang responsif</p>		
9	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	454.799.300	100,00	100,00	0,00	454.799.300	100,00	437.310.366	96,15	3,85						
9.1	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	189.099.900	100,00	100,00	0,00	189.099.900	100,00	174.360.250	92,21	7,79						
9.1.1	4.01.03.1.01.02	Facilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	147.100.000	100,00	100,00	0,00	147.100.000	100,00	132.580.550	90,13	9,87	<p>Pelaksanaan tugas Nyawiji yang Pesta Demokrasi oleh entitas.dra "Malamunwan Ngangsa Dalam Sri Jalan Kemenggu Buremo", S. Semoga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, lancar dan sukses. Yogyakarta tetap kekal.</p> <p>https://bit.ly/testimoni_pemerintahannum</p>	<p>BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum : 6 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Berkas usulan pemberitahuan, pengangkatan anggota DPRD pengangkatan antar wakil : 4 usulan SK dari 3 usulan SK 3. Pengajuan dan Pelembagaan Pejabat Kepala Daerah (Kabupaten Kuloprogo dan Kota Yogyakarta) : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. Laporan hasil Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 : 1 dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Berkas usulan pemberitahuan dan penggantian antar wakil anggota DPRD : 1. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/04261 tanggal 30 Desember 2022 tentang permohonan Permisian Pemecatan dan Pengangkatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 7/KEP/2023 tentang Permisian Pemecatan dan Pengangkatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Saundra Suprpto 2. Tanggal 5 Januari 2023 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 13/KEP/2023 tentang Permisian Pengangkatan Pengganti Antarwakil Anggota DPRD Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Kulis Galuharyo, tanggal 9 Januari 2023. 2. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/04159 tanggal 31 Januari tentang Permisian Permisian Pemecatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Bantul atas nama Sukandiono, S.H. Selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 10/KEP/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Permisian Pemecatan Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Sukandiono, S.H. 3. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 70/KEP/2023 tentang Permisian Pengangkatan Pengganti Antarwakil Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur DIY Nomor: 70/KEP/2023 tentang Permisian Pengangkatan Pengganti Antarwakil Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Saundri Sefri Indradewi, S.Pd pada tanggal 1 Maret 2023. 4. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/04048 tentang Penyempurnaan Draft Keputusan Gubernur DIY tentang Permisian Pemecatan dan Pengangkatan Administrasi dan Dokumen Pemecatan Antarwakil, Penggantian Antarwakil, dan Permisian Pemecatan Antarwakil Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya</p>		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>dinandatangani dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 19/10/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Dokumen Pemberitahuan Antarwaku, Penggantian Antarwaku, dan Pemberitahuan Sementara Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota</p> <p>5. Rappat-rapat koordinasi dalam rangka verifikasi kelengkapan Dokumen Usulan Permohonan dan Penggantian Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota</p> <p>6. Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor: 177/7462 tanggal 3 Juli 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Penggantian Antarwaku Anggota DPRD DIY</p> <p>Selanjutnya telah ditandatangani dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4 - 1107 Tahun 2023 tentang peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY, tanggal 31 Juli 2023 atas nama saudara Suparno, S.Pd karena meninggal dunia, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4 - 1135 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaku Anggota DPRD DIY atas nama saudara Christine Anjeliningsih, tanggal 3 Agustus 2023.</p> <p>7. Surat Gubernur DIY Kepada Mendagri Nomor: 177/7463 tanggal 3 Juli 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaku Anggota DPRD DIY. Selanjutnya telah ditandatangani dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-1188 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY atas nama saudara drs. H. Henam Solobito, MEd, tanggal 15 Agustus 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-1189 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaku Anggota DPRD DIY atas nama saudara Mulyono, SE, MEK, tanggal 15 Agustus 2023.</p> <p>8. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/0236 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaku Anggota DPRD Kabupaten/Bupati Masa Jabatan 2019-2024. Selanjutnya telah ditandatangani dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur DIY Nomor 266/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaku Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama saudara H.R. Ichwan Imanji Marjandani, S.E., tanggal 15 Agustus 2023 dari Partai Amanat Nasional dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 265/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaku Anggota DPRD Kab. Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Patrice Kayanti, tanggal 21 Agustus 2023.</p> <p>9. Surat Gubernur DIY Kepada Mendagri Nomor: 177/9710 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaku Pimpinan DPRD DIY saudara Suhawanta, ST, dipantikan oleh saudara Ir. Arno</p> <p>10. Surat Gubernur DIY Kepada Mendagri Nomor: 177/1036 tanggal 13 September 2023 tentang Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaku Anggota DPRD DIY saudara H. Ahmad Bahaji Rasi, B. Sc, M.A, dipantikan oleh saudara Suwadi Lestari.</p> <p>11. Nota dinas Biro Tata Pemerintahan kepada Biro Hukum Nomor: 177/0340 tanggal 1 November 2023 tentang Usulan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaku Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya telah ditandatangani dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur DIY Nomor: 375/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama H. Suryanto, S.E tanggal 10 November 2023 dan Keputusan Gubernur Daerah Yogyakarta Nomor: 376/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Eli Sertoso, tanggal 13 November 2023.</p> <p>Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rappat-rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024, Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Kamis, 9 Februari 2023 pukul 09.00-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kretna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Narasumber : Tim Agus Inchara, S.H (Bawaslu Kota Yogyakarta) dan drs. Nurharjati (KPU Kota Yogyakarta) S.S. Peserta : PKK se-Kemantren Gondokusuman dan Donorejo, Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kretna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Narasumber : Hidayat Widodo (KPU Kota Yogyakarta) dan Noor Hanjaya Anyosmidro S.Sn, MEd (Bawaslu Kota Yogyakarta) serta Kaputera Pengantjati (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY), Peserta : Tim Penggerak PKK Kemantren Kraton, Mangrove, dan Mangrove sukumati 60 orang, Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu, 15 Februari 2023 pukul 09.30-selesai di Kantor Kapewon Pengang, Gunungkidul. Narasumber - Heri Dwi Hartono, S.H (Korwas A DPRD DIY) ; Supriy, S.Sos (KPU Kab. Gunungkidul) ; Tri Ameyanto (Bawaslu Kab. Gunungkidul); Peserta : PKK se-Kapewon Pengang, Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Sabtu, 21 Februari 2023 pukul 09.00 -selesai di Kantor Kapewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Narasumber : Rosh Muzahid, SH (Korwas KPU Kab. Kulon Progo Wagiman ALH, (Bawaslu Kab. Kulon Progo) dan Anggota Komisi A DPRD DIY Nanda Kertika Hadji, S.T, Peserta : PKK se-Kapewon Lendah, Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2023 pukul 09.00 WIB-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Narasumber: Eko Sumarto (Ketua Komisi A DPRD DIY); Erni (KPU Kota Yogyakarta); dan Muhammad Muzlimin (Bawaslu Kota Yogyakarta); serta peserta dari PKK se-Kemantren Widyadipati, Pakuwati, Ngemplan, dan Gondomanan, Sosialisasi Tahapan pemilu Tahun 2024 pada Jumat 3 Maret 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Narasumber Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Sumarto; Hendrik Karmawan (Ketua KPU DIY) ; dan Drs. Muhammad Najih, M.Si, (Bawaslu DIY) Peserta : TP-PKK se-Kemantren Tegayrejo, Jetis, dan Gondongrejo, Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Selasa 7 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapewon Godean, Kabupaten Sleman. Peserta : TP PKK se-Kapewon Godean dengan narasumber anggota Sudaryanto, S.H (Komisi A DPRD DIY) ; Ahmad Shidiq, S.Th.L, M.Hum (KPU DIY) ; serta Drs. Mohammad Naji, M.Si, (Bawaslu DIY) Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada 9 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapewon Depok, Kabupaten Sleman. Narasumber Heri Dwi Hartono, S.H, (DPRD DIY), Assano Mawdhan (KPU Kab. Sleman) ; dan Vici Herawati, S.P (Bawaslu Kab. Sleman) Peserta TP PKK se-Kapewon Depok, Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu 15 April 2023 pukul 09.00-selesai di Kapewon Sewon, Kabupaten Bantul - Narasumber KPHI, Puradarmasari, SE, MEd (Komisi A DPRD DIY) ; Didi Sidi Nugroho, S.Ant (KPU Kab. Bantul) ; Satriyowati, SH, M, M.Pd (Bawaslu DIY). Peserta : TP PKK se-Kapewon Sewon Bantul Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat 17 April 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kretna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan. Peserta : TP PKK se-Kemantren Umbulharjo dan Kotagede, untuk narasumber Eko Sumarto S.H.Si (Komisi A DPRD DIY), Wawan Budiyanto, S.Ag, M.Si; (KPU DIY) Herina, S.H (Bawaslu Kab. Bantul) Rappat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Jajleg Nunging Ing Penta Demokasi pada tanggal 3 Oktober 2023, tanggal 11 Oktober 2023, dan tanggal 27 Oktober 2023. <p>Pemilihan Serentak Pilkada) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rappat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Bentuk Khusus Keunggulan Pelaksanaan Pilkada tahun 2024, Pengumpulan bekal staf Nomor 270/02191 tanggal 31 Juli 2023 Hal : Bantuan Keuangan Khusus Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten/Kota se-DIY, Rappat Kerja Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja Lantai III, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Dalam rappat kerja ini terdapat tiga narasumber yaitu: Kepala Saldidktorat Fasilitas Pemilu dan Pengembangan Demokras pada Direktorat Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri atas nama Bapak Soepan Setiadi, SH, M.Si, Analisis Kebijakan Abdi Muda Wilpoh 1 Direktorat KPDH dan DPRD Dinas Operasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak R. Hendy Nur Kusuma, STP, MA, dan Insan Depareren Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Bapak Bardi Dwidia Kumadhi, Ph.D, Peserta rappat dari OPD pengempu / memanageri Fasilitas Pilkada Tahun 2024, Surat Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-DIY, Nomor 390/83 tanggal 30 agustus 2023 Hal : Desk Pilkada Kabupaten/Kota di DIY, Tahap Staff kepada Sekretaris Daerah DIY Nomor: 270/02191 tanggal 31 Juli 2023 Hal: Bantuan Keuangan Khusus Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten/Kota se-DIY Perjalanan dinas ke Kabupaten Sleman dalam rangka Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 8 Desember 2023 Perjalanan dinas ke Kabupaten Bantul dalam rangka Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 7 Desember 2023 Perjalanan dinas ke Kabupaten Kulon Progo dalam rangka Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 14 Desember 2023 <p>Pelantikan PJ Bupati - PJ Walikota :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rappat Koordinasi Persiapan Pelelantikan Perjabat Bupati Kulon Progo dan PJ Wali Kota Yogyakarta dan PJ Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, Glad Bersih Pelelantikan Perjabat Bupati Kulon Progo dan Pelelantikan Wali Kota Yogyakarta sebagai Glad Bersih Pelelantikan Perjabat Ketua TP PKK Kabupaten/Kota pada Minggu, 11 Mei 2023 pukul 13.00-selesai di Bangsal Keppathan dan Gedung Praasmanora Pelelantikan Perjabat Bupati Kulon Progo dan Perjabat Wali Kota Yogyakarta oleh Bupati Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 12.00-selesai di Bangsal Keppathan Pelelantikan Perjabat Ketua TP PKK Kabupaten Kulon Progo dan TP PKK Kota Yogyakarta oleh Wakil Ketua I TP PKK DIY GOSRAY Paksi Alam pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 15.00-selesai di Gedung Praasmanora. <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Efisiensi dari Penyelenggaraan Sosialisasi sebesar Rp.2.000.000 karena narasumber yang tidak hadir 0.00 (Rp.2.000.000). Efisiensi dari penyelenggaraan pelelantikan sebesar Rp.12.297.450 yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Efisiensi angsuran backdrop Pelelantikan PJ Bupati dan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)						
															<p>Wali Kota dan Wakil Wali Kota TP PKK Kabupaten/Kota Rp.700.000,- karena harga pasar masih tinggi dari anggaran</p> <p>DPA sehingga difasilitasi oleh Biro LHP,</p> <p>b. Efisiensi Honor Rohanwan Rp.400.000 (hanya Agena Idem saja)</p> <p>c. efisiensi anggaran Paksiwan Dinas Ulapara Rp.4.575.450 (harga dibawah DPA)</p> <p>d. Efisiensi anggaran bumbung SK Rp.142.000 (harga pasar dibawah harga DPA)</p> <p>e. Efisiensi Cetak (mater) Rp.180.000 (karena nersumber 2 Di kota hulu)</p> <p>3. Efisiensi anggaran ATK sebesar Rp.39.700 (harga pasar dibawah harga DPA)</p> <p>4. Efisiensi perjalanan dinas daerah Rp100.000 (1 OH tidak dapat mengikuti pergiliran)</p> <p>5. Efisiensi ATK sebesar 35.900</p> <p>6. Menunggu penetapan APBD Perubahan 2023 dan kebijakan retribusi karena arahan dari DPRD kegiatan ini tidak boleh dilaksanakan karena masih menunggu evaluasi dari Dinas target output sudah tercapai, hal tersebut tidak mempengaruhi ketercapaian output karena dapat dilaksanakan melalui rapat-rapat kecil secara intens.</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik dengan pembaharutan dan stakeholder terkait. Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana kantor.
9.1.2	4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Peta Wilayah	41.999.900	100,00	100,00	0,00	41.999.900	100,00	41.779.700	99,48	0,52		BRNO TATA PEMERINTAHAN Bagian Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peta Wilayah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Laporan penyelenggaraan pembangunan di wilayah perbatasan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen <p>testimoni penyelenggaraan pembangunan wilayah perbatasan DIY oleh Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Fisipol UGM</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1N_65z2G6N7z3yV1N8z2q77A4DEE?usp=sharing</p> <p>1. Tersusunnya jadwal rencana pelaksanaan kegiatan</p> <p>2. Tersusunnya rapat koordinasi internal di dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Tertekannya rapat koordinasi finalisasi Raperub Pengkoordinasian pembangunan wilayah perbatasan</p> <p>4. Tertekannya rapat koordinasi terkait pembatasan penyusunan Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan DIY tahun 2023</p> <p>5. Tersusunnya surat permohonan persoril Tim Pembangunan wilayah perbatasan DIY tahun 2023</p> <p>6. Tertekannya koordinasi dan penetapan penyelesaian pembangunan wilayah perbatasan di Kab. Sleman dan Kab. Gunungkidul</p> <p>7. Tertekannya Raker Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY</p> <p>8. Tersusunnya data identifikasi permasalahan di kawasan perbatasan provinsi/kabupaten/kota</p> <p>9. Selesaiannya pengisian Jata 1A Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Perbatasan dengan SPK 027/01/21 dan 027/01/22 tanggal 24 Mei 2023</p> <p>10. Identifikasi permasalahan terbanyak di wilayah perbatasan antara lain terkait sarana dan prasarana, Rumah tinggal Layak Huni, Kesehatan dan juga lingkungan</p> <p>11. Seandainya arah pembangunan di wilayah perbatasan akan berfokus pada peningkatan kualitas jalan serta peningkatan kapasitas SDN</p> <p>12. Perencanaan DIY telah melaksanakan berbagai upaya media program dan kegiatan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya antar kabupaten/kota. Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah DIY meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni baru Rehabilitasi dan peningkatan kualitas jalan Operasi pemeliharaan rutin saluran drainase Sosialisasi P4GN Pelatihan keterampilan Peningkatan pelayanan di Puskesmas pembantu Peningkatan pelayanan kesehatan desa Peningkatan SPN Pedesaan Pembinaan terhadap anak sekolah Edukasi kesehatan ke masyarakat <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Data potensi permasalahan perbatasan dari Bappeda kabupaten/kota belum disampaikan tepat waktu</p> <p>Terdapat efisiensi sebesar Rp. 220.200 atau kurang cover 65.000, dalam komputer Rp. 35.200 dan honor narasumber Rp. 100.000</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>Kesungguhan yang solid dan koordinasi yang baik antara OPD Pemda DIY</p>	
9.2	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	75.000.000	100,00	100,00	0,00	75.000.000	100,00	72.909.000	97,21	2,79				<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan LPPD DIY Tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Tim Pelaporan LPPD Tahun 2022 Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2022 Penyusunan LPPD Tahun 2022 Desk Verifikasi Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2022 Revisi Penyusunan LPPD (Rancangan) Tahun 2022 Tindak Lanjut Revisi LPPD 2022 Entri data dan dokumen pendukung dalam aplikasi SILPPO RLPPO Pengumpulan bahan/bukti dukung pemutakhiran IKK LPPD 2022 Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi LPPD Kab/Kota Tahun 2022 Koordinasi Pelaksanaan Uji Petik EPPD Tahun 2023 oleh Tim Nasional berdasarkan LPPD Tahun 2022 Entry meeting pelaksanaan uji petik terhadap EPPD Tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 Uji Petik terhadap EPPD Tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 dan Tindak Lanjutnya Pemutakhiran IKK LPPD Tahun 2022 dalam SILPPO Koordinasi Pemutakhiran IKK Asimetri DIY LPPD 2023 Usulan IKK Asimetri DIY LPPD 2023 <p>Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Tim Penerapan SPM DIY Pengumpulan data Laporan Penerapan SPM DIY Tahun 2022 Entri data laporan SPM Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2022 Verifikasi data laporan penerapan SPM DIY Tahun 2022 Sinkronisasi data SPM 2022 dengan data LPPD 2022 Moonev dan Pelaporan SPM DIY Tahun 2023 Pelaporan SPM TW 1 Tahun 2023 Evaluasi SPM pada Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota se-DIY Tahun 2022 Penyusunan dan Pembahasan Draft Raperub SPM DIY Pengganti Perpu 11/2020 Pemayaman Draft Raperub SPM Pengganti Perpu 11/2020 ke Biro Hukum Pelaporan SPM TW 2 Tahun 2023 dalam aplikasi e-SPM Penyusunan Perubahan Persoril Tim SPM Surat Penyusunan RKT Dinas Sosial-OB Global Evaluasi SPM Perubahan APBD Tahun 2023 Semua Kab/Kota di DIY Pelaporan SPM TW 3 Tahun 2023 dalam aplikasi eSPM FGD Pemantauan dan evaluasi SPM Pengisian kuisioner Moonev SPM Tahun 2023 Berapasan Tindak Lanjut Pemantauan SPM Kesehatan Kabupaten/Kota se-DIY Tindak Lanjut Pemantauan Pencapaian Target SPM Kelurahan Lumut (Air Minum dan Air Limbah) Kabupaten/Kota se-DIY Tahun ditetapkan dan diundangkannya Perpu Nomor 76/2023 tentang Indikasi Perencanaan SPM Evaluasi anggaran SPM pada APBD 2024 semua Kab/Kota di DIY Persiapan Pelaporan TW IV dan Laporan SPM Tahun 2023 <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Tersedianya Pemantauan</p> <p>1. Necessity Pemohonan Informasi (Keterbukaan Informasi Publik) LPPD DIY Tahun 2017 - 2022</p> <p>2. Raper Pengalihan aset jalan dari Kementerian PUPR RI kepada Pemda DIY dan dari Pemda DIY kepada Kem. PUPR RI</p> <p>3. Penyempitan data sarana dan prasarana jalan (BND) yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jating DIY di Semarang</p> <p>4. Penyempitan data (soft copy) kelengkapan data (ortofoto, dll) sarana dan prasarana jalan (BND) yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jating DIY di Semarang dan sebaliknya untuk diverifikasi</p> <p>5. Pembaruan permasalahan aset Sumber Daya Air (SDA) UPM-ESDM yang akan diminta oleh BBNBO</p> <p>6. Verifikasi aset jalan yang akan diserahkan dari Kementerian kepada Pemda DIY dengan skema hibah</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>LPPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat capaian-capaian yang belum optimal dikarenakan IKK LPPD masih ada yang belum menjadi target kinerja OPD yang diupayakan dengan anggaran yang memadai; Perbedaan persepsi terkait definisi IKK; Terdapat efisiensi at cost persampulan diatas nersumber dan honor nersumber (langganan eselon II yg hadir eselon III) dan ATK. <p>SPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data yang dihasilkan pada Pendataan SPM berdasarkan Permendagri 59/2021 belum lengkap. Update data Tahun 2022 sedang persidikan, kesehatan dan sosial belum dapat disajikan oleh OPD anggarans; Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan SPM. Pemenuhan anggaran SPM dibandingkan dengan anggaran untuk pelayanan dasar maupun APBD masih sangat kecil padahal SPM adalah isi dari usun pelayanan dasar. <p>Faktor Pendukung:</p> <p>LPPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya komitmen dari pimpinan untuk Pelaporan Pemda DIY Tahun 2022 antara lain di LPPD, LKIP, LAKIP, LKUP dan SPM; Penyusunan perundang dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait (Inspektoriat maupun OPD) terkait definisi IKK; <p>SPM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya pelaporan triwulanan pada aplikasi eSPM; Pelaporan SPM Tahun 2022 telah menggunakan format sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021; Disekalikannya Dana Kestimbangan dapat digunakan untuk mendanai/covering pemenuhan SPM; Koordinasi intensif Tim SPM DIY dengan Tim SPM Kab/Kota dan Sebesar SPM Pusat; Telah disampaikan Surat Gubernur kepada OPD Pengemas SPM di Pemda DIY terkait Pelaporan Triwulanan dan Pendataan SPM (Update) per Tahun 2023 Adanya inspektoriat di Internal Pemda DIY dan Kab/Kota se-DIY terkait permasalahan pengenteng pelaporan SPM pada aplikasi eSPM Moonev SPM tidak hanya dilakukan dengan anggaran dari Biro Tazem tetapi juga dalam forum evaluasi Perda Pertanggungjawaban APBD/RAPBD/PAPBD di BPKA. Moonev juga dilaksanakan melalui anggaran Dekonsentrasi GAPP yang dituangkan oleh Inspektoriat maupun dari keanggotaan Tim SPM lainnya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)							Realisasi (%)
9.3	4.01.03.1.03	Facilitasi Kerja Sama Daerah	190.699.400	100,00	100,00	0,00	190.699.400	100,00	190.041.116	99,65	0,35				<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan Naskah Perjanjian Kerjasama - Dalam Regeri : <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Tim TKKSD sebagai pendukung kelancaran penyusunan naskah kerjasama 2. Melakukan rapat koordinasi penyusunan naskah kerjasama bulan Januari - Pelaksanaan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama bulan Reperi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Rabu, 1-2-2023, Pembahasan naskah PKS antara Pemda DIY dengan PT. Bank Mandiri 2. Kamis, 2-2-2023, Pembahasan KSA antara Pemda DIY dengan Universitas Sebelas Maret 3. Selasa, 14-2-2023, Pembahasan usulan naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan STPKat Santo Fransiskus Asisi Semarang 4. Selasa, 21-2-2023, Pembahasan naskah PKS antara DPRD DIY dengan DPRK Kabupaten Jember 5. Senin, 24-2-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan RS Sardjito dik 6. Rabu, 12-3-2023, Pembahasan tindak lanjut draf KAK TMA Regional Piyungan 7. Selasa, 9-5-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan Pemda DIY 8. Jumat, 12-5-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan Pemda DIY 9. Selasa, 6-6-2023, Pembahasan draf naskah kerja sama antara Perkuwasi dengan Pemda DIY 10. Jumat, 9-6-2023, Rapat koordinasi jejaring pengembang 11. Jumat, 7-7-2023, Persiapan penandatanganan naskah kerja sama Rumi Saliq pengembang 12. Senin, 10-7-2023, Pembahasan naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Sumatera Selatan 13. Selasa, 14-8-2023, Pembahasan naskah kerja sama (KSA) TPA Piyungan 14. Jumat, 14-8-2023, Pembahasan rencana kerja antara Pemda DIY dengan BKKBN 15. Jumat, 15-8-2023, Pembahasan rencana kerja Pemda DIY dengan Lemhans 16. Rabu, 27-9-2023, Inventarisasi dan analisis kerja sama daerah Kabupaten/Nota se-DIY 17. Rabu, 4-10-2023, Pembahasan rencana kerja sama antara TNI AU dengan Pemda DIY 18. Selasa, 17-10-2023, Pembahasan rencana kerja sama antara Yayasan Karyo Bina dengan Pemda DIY 19. Senin, 6-11-2023, Pembahasan rencana kerja antara Koperasi Daerah DIY dan Pemda DIY 20. Rabu, 8-11-2023, Monev pelaksanaan kerja sama antara Pemprov Jember dengan Pemda DIY -Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa Tim TKKSD mengalami perubahan personil 2. Masih ada beberapa instansi yang belum memahami tentang jenis kerja sama apa yang bisa di fasilitasi di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 3. Sangat susah mengumpulkan Tim TKKSD secara utuh pada forum rapat off line. <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim TKKSD telah memahami dasar hukum pelaksanaan kerja sama daerah di DIY yaitu PP09/2018 dan Permendagri 12/2010. 2. Tim TKKSD sangat membantu dalam proses penyusunan naskah kerja terutama menanggapi permasalahan yang timbul antar para pihak ketika proses penyusunan naskah. 3. Rapat on line sangat membantu dalam pelaksanaan rapat penyusunan naskah kerja sama karena tidak perlu mengundang Tim TKKSD untuk bisa mengikuti rapat di sela kesibukan masing-masing. 	
9.3.1	4.01.03.1.03.01	Facilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	190.699.400	100,00	100,00	0,00	190.699.400	100,00	190.041.116	99,65	0,35		1. Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang difasilitasi : 56 2. Dokumen dari 2 Dokumen			<p>Dengan adanya kerja sama antara Kementerian Perdagangan RI dengan BKKSD DIY maka telah bisa dilaksanakan pelatihan yang sangat bermanfaat di bidang perdagangan untuk ASN di Pemda DIY</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1mfErlumR5Ckz25pVHT9f9y97g?usp=sharing</p>
10	4.01.10	PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	3.193.542.350	100,00	100,00	0,00	3.193.542.350	100,00	3.037.250.397	95,11	4,89					
10.1	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	2.874.183.550	100,00	100,00	0,00	2.874.183.550	100,00	2.725.766.297	94,84	5,16					
10.1.1	4.01.10.5.01.10	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kaparewon/Komartren dan Kelurahan/Kelurahan	2.874.183.550	100,00	100,00	0,00	2.874.183.550	100,00	2.725.766.297	94,84	5,16				<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kaparewon/Komartren dan Kelurahan/Kelurahan yang ditina : 2 Dokumen dari 9 Dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan Penerapan Kelembagaan Kelurahan / Kelurahan/Kelurahan dan Kaparewon/Komartren - Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan koordinasi, penentuan dan evaluasi penerapan Kelembagaan Kaparewon / Komartren melalui koordinasi internal menertakan bahan materi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait. - Tetapannya koordinasi, penentuan dan evaluasi penerapan kelembagaan kaparewon/komartren dan Kelurahan/Kelurahan melalui koordinasi lapangan ke Kabupaten/Bantul melalui forum rapat koordinasi. Kemudian koordinasi dalam upaya pengantalan peran pemerintah kelurahan dilakukan melalui forum rapat kerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dengan sasaran pembaharuan 8 area perubahan pada penerapan reformasi birokrasi kelurahan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal 24 Januari 2023 dengan sasaran pembaharuan area manajemen perubahan dan perubahan area penguatan organisasi, tata laksana dan penguatan pengembangan b. Tanggal 25 Januari 2023 dengan sasaran pembaharuan area penguatan organisasi, tata laksana dan penguatan pengembangan c. Tanggal 26 Januari 2023 dengan sasaran pembaharuan area perubahan Penguatan SDM d. Tanggal 30 Januari 2023 dengan sasaran pembaharuan area perubahan Penguatan Akuntabilitas e. Tanggal 31 Januari 2023 dengan sasaran pembaharuan area perubahan Penguatan Pelayanan Publik Quick Wins dan Lembar Kerja Evaluasi -Penguatan terhadap kebijakan reformasi birokrasi kelurahan melalui Rapat Koordinasi dan Kerja Sama Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Pemangung Lurah dan Pemangung OPD Pemda Kabupaten, Kabupaten Lurah dan Pemangung serta kaparewon dengan sandi: <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal 21 Februari di Kabupaten Bantul b. Tanggal 22 Februari di Kabupaten Gunungkidul c. Tanggal 23 Februari di Kabupaten Kulon Progo d. Tanggal 27 Februari di Kabupaten Sleman - Koordinasi bersama Akademisi untuk memedah draft perubah Reformasi Birokrasi Kelurahan pada tanggal 15 Maret untuk mendiskusikan jurnal RIKOL. - Pelaksanaan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kaparewon/Komartren <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal 26 Maret di Kelurahan Gedongkwo, Kecamatan Nyanjarta, Kota Yogyakarta b. Tanggal 28 Maret di Kelurahan Mangunan, Kaparewon Dlingo, Kabupaten Bantul c. Tanggal 29 Maret di Kabupaten Gereswari, Kaparewon Pajegan, Kabupaten Bantul d. Tanggal 31 Maret di Kabupaten Mantik, Kaparewon Dlingo, Kabupaten Bantul e. Tanggal 6 April di Kelurahan Wukirsari, Kaparewon Cangriangan, Kabupaten Sleman f. Tanggal 11 April di Kelurahan Selamayu, Kaparewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo g. Tanggal 14 April di Kelurahan Tiarog, Kaparewon Gersubo, Kabupaten Gunungkidul e. Tanggal 19 Mei Pelaksanaan Forum Komunikasi melibatkan SDM Nyanjarta dan OPD Pemda DIY f. Tanggal 21 Agustus Pelaksanaan Forum Komunikasi melibatkan SDM Pajegan Lurah DIY Yogyakarta g. Tanggal 22 dan 23 Pelaksanaan Forum Komunikasi melibatkan aparat pemerintahan Kelurahan yang bertanggung terkait sistem informasi kelurahan bertema: opt. STPMO APMD melibatkan Nusanbar dari akademisi. - Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kaparewon/Dulu se-DIY dengan melibatkan pemateri dari Kraton dan Nyanjarta pada tanggal 28 Februari - Tersusunnya Laporan Progress Dokumen Penerapan Kelembagaan di Kaparewon/Komartren dan Kelurahan/Kelurahan 2) Laporan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Penetapan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kaparewon/Komartren dan Kelurahan/Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Pajegan Lurah dan Pemangung DIY Nyanjarta serta pelaksanaan Kerja Sama Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kaparewon/Komartren - Optimalisasi Tenaga Ahli dengan melibatkan akademisi dari Kota STPMO APMD, Dr.Sutoro Eko Yunarto dan Bapak Dharma Sutrisno. - Tersusunnya laporan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Penetapan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kaparewon/Komartren dan Kelurahan/Kelurahan 3) Sosialisasi Kelembagaan Asli DIY <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pengantalan materi dan penyusunan kerangka acuan kerja rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi kelembagaan asli DIY dengan hasil pelaksanaan di bulan Februari sebelumnya 10 kali melibatkan aparat pemerintah kelurahan di Kabupaten Sleman - Berlangsungnya sosialisasi kelembagaan asli Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan Lurah/Pemangung Kelurahan, Badan Permasyarakatan Kelurahan serta Ketua Dukcapil, dengan rundown sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal 21-24 Februari dengan lokasi peserta dari Kelurahan se-Kabupaten Sleman b. Tanggal 27 Februari dengan lokasi peserta dari Kabupaten Bantul c. Tanggal 14,15,16 dan 17 Maret dengan lokasi peserta dari Kabupaten Gunungkidul d. Tanggal 8, 9, 15, 16, dan 17 Maret 2023 dengan lokasi peserta dari Kabupaten Gunungkidul e. Tanggal 11,15,16,17 dan 19 Mei 2023 dengan lokasi peserta dari Kabupaten Kulon Progo f. Tanggal 15,16,22,23 dan 26 Juni 2023 dengan lokasi peserta dari Kota Yogyakarta g. Tanggal 12,14,17,21 dan 26 Juli 2023 dengan lokasi peserta dari Kota Yogyakarta h. Tanggal 22, 25,28,29,30,31 Agustus 2023 dengan lokasi peserta dari Kota Yogyakarta -Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli 60 kali. 4) Pengembangan Sistem Informasi Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi untuk membahas KAK dan Focus Group Discussion Pengembangan Sistem Informasi Kelurahan dengan konteks Kajian Peta Jalan / roadmap Sistem Informasi Kelurahan pada tanggal 13 Juni 2023. -Rapat Koordinasi pembahasan kerangka acuan kerja kajian peta jalan sistem informasi kelurahan - Focus Group Discussion Kajian Peta Jalan Sistem Informasi Kelurahan pada tanggal 13 Juni dan 10 Agustus -Ekspose Kajian Peta Jalan Sistem Informasi Kelurahan 	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
10.2	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Kelembagaan	319.358.800	100,00	100,00	0,00	319.358.800	100,00	311.484.100	97,53	2,47						<p>pada tanggal 22 Agustus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya hasil identifikasi permasalahan pemantauan sistem informasi kalurahan melalui draft rancangan Kajian Peta Jalan Sistem Informasi Kalurahan. - Tersusunnya dokumen kajian peta jalan Sistem Informasi Kalurahan dengan terbayarkannya Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Tematika sebesar 1 Paket. <p>*Pemeliharaan Sistem Informasi Kalurahan*</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Penyelidikan Pemeliharaan substansi pemeliharaan sistem informasi kalurahan dengan koreksi pemeliharaan menu co-reform space pada tanggal 11 September. - Koordinasi teknis dengan pihak penyedia terkait pemeliharaan menu co-reform space pada Sibel pada tanggal 9 November dengan hasil penulisan redesain menu pada co-reform menjadi rencana aksi dengan mekanisme user pemerintah kalurahan adalah "memilih pelaksanaan rencana aksi yang akan diprioritaskan". - Penambahan menu Co-reform space untuk pengisian rencana aksi pengisian informasi binirasi kalurahan. - Dokumen pengisian telah diselesaikan oleh pihak rekening dengan Nomor BAST/070/WHSD dengan tondok barang/jasa sebesar 100%. - Tersusunnya laporan pemeliharaan sistem informasi kalurahan dengan pemeliharaan menu Co-reform Space. <p>5) Fasilitas, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada 392 Kalurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Penyelidikan Konsep Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tanggal 10, 13 dan 25 Juli dengan hasil bahwa reformasi birokrasi kalurahan bertumpu pada 4 hal kegiatan utama, yaitu: manajemen kinerja kerja dan keuangan, perbaikan pengendalian, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan SDM serta untuk rencana aksi nantinya disusun berdasarkan kesesuaian dengan tema tersebut. - Rapat Koordinasi Pembahasan Konsep rancangan Reformasi Birokrasi Kalurahan bersama tim RBKAI pada tanggal 6, 11, 10 dan 25 Juli - Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan pada tanggal 20 September dengan hasil penetapan pemeliharaan SK Tim RBKAI dilaksanakan dengan cara kali waktu: Penetapan Rapergub Rkai. - Rapat Koordinasi Persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tanggal 4, 12 dan 16 Oktober dengan hasil penetapan tanggal Kick Off. Selain tema pembagian tugas Tim serta protokoler Gubernur, kehadiran perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDTT, dan Kementerian PAN RB. - Pelaksanaan Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan pada tanggal 19 Oktober di Ballroom Kasatrian Royal Antabanda Yogyakarta sebagai launching Perjudi 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan dengan narasumber RBKAI dan DPRK, dihadiri 500 tamu undangan yang terdiri dari unsur: OPD Pemda DIY, OPD Pemda Kabupaten, Kabupaten, Lurah, Akademisi, Paramara Praja, Forkompda, dengan Sambutan Gubernur serta penyempitan materi dan Direktur Fasilitas - Pelaksanaan Focus Group Discussion Kajian Podom Peningkatan Kapasitas Aparatur: Drs. Lutfi T.M.Si, Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan: Sugito, S.Sos, Msi, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja: Abdul Hakim, S.Sos, M.Si serta Asisten Deputi Koordinator Pelaksana dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemerpri RB Alimatus Solikhah, Ak. - Publikasi pelaksanaan Kick Off Meeting pada media cetak: Kedaulatan Rakyat dan Nenas Jogja. - Koordinasi persiapan pelaksanaan training of Trainer Reorientasi Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tanggal 20 Oktober dengan hasil bahwa pelaksanaan TOT dilakukan pada tanggal 24, 25, 26 dan 27 untuk Kabupaten Bantul, tanggal 25, 26, 27 dan 30 untuk Kabupaten Gunungkidul, tanggal 26, 27, 28 dan 31 untuk Kabupaten Kulon Progo, tanggal 27, 28, 31 Oktober dan 1 November untuk Kabupaten Sleman - Pelaksanaan training of Trainer Reorientasi Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tanggal 24, 25, 26 dan 27 untuk Kabupaten Bantul bertempat di Grand Sahari, tanggal 25, 26, 27 dan 30 bertempat di Hotel Senika Gunungkidul untuk Kabupaten Gunungkidul, tanggal 26, 27, 28 dan 31 untuk Kabupaten Kulon Progo bertempat di Ibis Hotel VILA, serta tanggal 27, 28, 31 Oktober dan 1 November untuk Kabupaten Sleman - Tersusunnya laporan hasil Fasilitas, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada 392 Kalurahan <p>6) Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Penyelidikan Pemeliharaan Kerangka Acuan Kerja Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan - Pelaksanaan Focus Group Discussion Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur - Penyelidikan Pemeliharaan Kalurahan pada tanggal 8 dan 25 September menghadirkan narasumber dari akademisi dan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, melibatkan audience dari Dinas PHKAI Kabupaten dan Peningkatan Bermaning. - Pelaksanaan ekspose Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan pada tanggal 5 Desember 2023 dengan melibatkan unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan. - Tersusunnya hasil kajian pedoman peningkatan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan kalurahan. <p>7) Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggaran terwujudnya kebijakan reformasi birokrasi kalurahan melalui Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebanyak 4 kali melibatkan OPD Pemda Kabupaten, Pagaruyuban Lurah dan Panitia serta kaperwakilan dengan rundown: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 21 Februari di Kabupaten Bantul b. Tanggal 27 Februari di Kabupaten Gunungkidul c. Tanggal 27 Februari di Kabupaten Kulon Progo d. Tanggal 27 Februari di Kabupaten Sleman - Koordinasi konsep sosialisasi untuk roll banner ke 392 kalurahan, dan OPD Pemda DIY/Kai pada tanggal 13 November - Penyediaan dokumen pengandaan Roll Up Banner dengan rekaman dan dinyatakan selesai dengan hasil pekerjaan 100%. - Pembagian Roll Up Banner dengan substansi Reorientasi Kebijakan Reformasi Kalurahan sesuai Perjudi 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan sampai dengan tanggal 5 Desember telah terdistribusi di 392 Kalurahan dan total 461. - Tersesalkannya pengandaan roll up banner sosialisasi reformasi birokrasi kalurahan <p>8) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kalurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Persiapan Bimtek Peningkatan Kapasitas aparat dengan hasil pelaksanaan pada minggu ketiga, melibatkan akademisi STPHD APHD dan tim ahli sistem informasi kalurahan sesuai konteks pembelajaran terkait pengisian co-reform space pengisian informasi binirasi kalurahan. - Pelaksanaan Bimbingan Teles Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan melibatkan lebih dari 98 aparat pada tanggal 20 dan 21 November bertempat di Ruang Pertemuan M.Soepto STPHD APHD. - Pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas aparat pemerintahan kalurahan sejumlah 98 aparat. <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli DIY sebagai kegiatan oustan keadilan terlewat pelaksanaan tanpa kehadiran narasumber dari DPRD DIY, sehingga adanya pengembalian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Hari: honorarium narasumber @1.000.000 x 3 - Hari: honorarium narasumber @1.000.000 x 4 - Juni: honorarium narasumber @1.000.000 x 2 - Juli: Pengembalian honorarium narasumber - Agustus: pengembalian honorarium narasumber: @1.000.000 x 4 a. sosialisasi kelembagaan asli DIY: @1.000.000 x 4 2. Efisiensi Zoom, sebesar 1.449.940 3. Efisiensi belian pada kegiatan Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi Kalurahan: honorarium narasumber, serta kendaraan. 4. Efisiensi narasumber pada kegiatan Training Of Trainer Peningkatan Reformasi Birokrasi Kalurahan sebesar Rp14.900.000,00 5. Perjalanan dinas biaya efisiensi pada kegiatan kearif off meeting reformasi kalurahan pada bulan Oktober: Rp10.450.000 6. Efisiensi paket meeting dalam kota: <ol style="list-style-type: none"> a. di kegiatan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Aparatur/Kemantren sebesar Rp9.900.000 b. Ekspose Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kalurahan sebesar Rp1.800.000,00 c. Honorarium Narasumber Ekspose Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kalurahan: Rp4.000.000. d. ATK (seminar kit) pada kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kalurahan sebesar Rp10.368.000,00 <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan giat sosialisasi kelembagaan asli DIY, adanya komitmen peserta undangan untuk hadir mengikuti dan berperan aktif. 2. Kemudahan koordinasi dengan bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta terkait pelaksanaan Sosialisasi Kelembagaan Asli DIY sehingga unsur sarana kegiatan terlayani. 3. Kesediaan waktu dan bahan paparan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Masukan dan arahan dari OPD Pemda DIY dalam memformasi draft program reformasi birokrasi kalurahan. 4. Komitmen Tenaga ahli dalam penyusunan kajian peta jalan sistem informasi kalurahan 5. Kegiatan waktu penyelesaian dokumen Kajian Peta Jalan Sistem Informasi Kalurahan 6. Kesediaan narasumber dari akademisi dan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta pada FGD Kajian Pedoman Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. 7. Kehadiran perwakilan narasumber dari Kementerian Desa, PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemendagri RB serta tamu undangan pada acara Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan 8. Kesediaan Ketua STPHD APHD untuk memberikan pengarah pada pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kalurahan serta minat pembelajaran yang substansi diel pengoper dari STPHD APHD 9. Komitmen tim STPHD APHD untuk menged trainer dalam pelaksanaan TOT Reformasi Birokrasi Kalurahan 10. Ketersediaan waktu dan kualitas analisis tenaga ahli penyusunan dokumen kajian peningkatan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan kalurahan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progress Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
10.2.1	4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kembangan	319.358.800	100,00	100,00	0,00	319.358.800	100,00	311.484.100	97,53	2,47	Testimoni Ketua Paguyuban Lurah DIY Nanyatka terkait coding Jenggotan yang dipergunakan untuk ruang kerja Nanyatka	https://tinyurl.com/fasilitsiasuagapaguyubanLurah	BIRO TATA PERHESANTAMAN - Pemerintahan Kabupaten/Kelurahan dan Kabupaten/Kemantren			<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY - Pelaksanaan Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY 2) Air Conditioner - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Air Conditioner - Pelaksanaan Pengadaan Air Conditioner dengan spesifikasi: AC PSC, spesifikasi: 1 pk 3) Printer - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Printer - Pelaksanaan Pengadaan Printer dengan spesifikasi: PRINTER HP LASERJET PRO MFP M42770w 4) Televisi - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Televisi - Pelaksanaan Pengadaan Televisi dengan spesifikasi: 60" 5) Personal Computer - Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Personal Computer - Pelaksanaan Pengadaan Personal Computer dengan spesifikasi: All In One PC-Black-Monitor 21 in-USB Keyboard & M... 6) Laptop - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Laptop - Pelaksanaan Pengadaan Laptop dengan spesifikasi: i7 7) LCD - Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan LCD - Pelaksanaan Pengadaan LCD dengan spesifikasi: LCD 5300 Lumen WiFi Projector <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi LS, harga penawaran dari penyedia lebih mahal. 2. Tidak ada hambatan berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya diri Pemakaian Gedung di Jenggotan dari Dinas PU untuk dipergunakan Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY - Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang sesuai spesifik.
Jumlah			5.406.383.650	100,00	100,00		5.406.383.650	100,00	5.153.795.944	95,33							